

PAHANDUT

**SUATU TINJAUAN SEJARAH SOSIAL
POLITIK**



Direktorat
Budayaan

4

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL

JL. LETJEND SUTOYO PONTIANAK (78121), TELP. (0561) 737906, FAX. (0561) 760707

TAHUN 2006

959 8 34

HEN

P

PAHANDUT

SUATU TINJAUAN SEJARAH SOSIAL POLITIK

PENGARAH : DRA. LISYAWATI NURCAHYANI, M.Si

PENULIS : DRA. HENDRASWATI

DRA. ASNAINI

PEMBAYUN SULISTYORINI, S.S

**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL**

Jl. LETJEND. SUTOYO PONTIANAK (78121); TELP. (0561) 737906; FAX. (0561) 760707

TAHUN 2006

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT karena atas berkah dan limpahan RahmatNya sehingga penulisan yang berjudul *Pahandut (Suatu Tinjauan Sejarah Sosial Budaya dan Politik)* ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan ini merupakan suatu kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak tahun anggaran 2006.

Penulisan tentang *Pahandut (Suatu Tinjauan Sejarah Sosial Budaya dan Politik)* ini dimaksudkan untuk menggali dan mengembangkan pengetahuan sejarah lokal sebagai unsur sejarah wilayah Indonesia, sehingga diharapkan hasil dari tulisan ini dapat memberikan sepintas gambaran tentang Sejarah daerah Pahandut sebagai cikal bakal Kota Palangkaraya sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah.

Terselesainya penulisan ini berkat bantuan yang sangat besar dari para nara sumber/informan yang telah bersedia diwawancarai dan para petugas dari beberapa instansi terkait yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik pada waktu pengumpulan data di lapangan maupun pada waktu penulisan laporan .

Hasil pengumpulan data di lapangan, kemudian dianalisa dan ditulis dalam bentuk penulisan yang sistematis untuk selanjutnya dapat disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat umumnya dengan maksud agar sejarah Pahandut ini dapat dibaca dan dipahami oleh semua kalangan masyarakat dan selanjutnya dapat diambil nilai-nilai kesejarahan yang terkandung di dalamnya.

Kami menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan di sana sini. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya tulisan ini.

Kami berharap semoga tulisan ini ada manfaatnya dan dapat menjadi sumber data sekunder untuk penelitian lebih lanjut.

Pontianak, Agustus 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR FOTO	v
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang dan Permasalahan	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Metode dan Pendekatan	3
1.4 Telaah Sumber	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II LINTASAN SEJARAH PAHANDUT	
2.1 Asal Mula Kampung dan Nama Pahandut	7
2.2 Penduduk	10
2.2.1 Penduduk Asli	10
2.2.2 Penduduk Pendetang	10
2.3 Pertumbuhan dan Perkembangan Sosial Budaya Masyarakat	12
2.3.1 Matapencaharian	12
2.3.2 Transportasi	14
2.3.3 Agama dan Kepercayaan	15
2.3.4 Pola Pemukiman	19
2.3.5 Susunan Masyarakat	23
BAB III PAHANDUT DAN PALANGKA RAYA	
3.1 Latar Belakang Terbentuknya Propinsi Kalimantan Tengah	25
3.2 Pahandut Dipilih Sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah	30
3.3 Pahandut dan Timbulnya Nama Palangka Raya	33
3.4 Perkembangan Pahandut Setelah Ada Palangka Raya	38

BAB IV STRUKTUR PEMERINTAHAN

4.1	Sebelum Masa Penjajahan	41
4.2	Masa Penjajahan	42
4.2.1	Tamanggung	42
4.2.2	Damang	43
4.2.3	Pembekal	45
4.3	Setelah Kemerdekaan	48
4.4	Era Otonomi Daerah	49

BAB V PENUTUP	53
----------------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA	57
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Daftar Informan	61
- Daftar Pertanyaan	63
- Peta	65

DAFTAR FOTO

No.	Halaman
1. Pelabuhan Rambang di Kampung Pahandut Merupakan Urat Nadi Perekonomian Masyarakat Pahandut Tempo Dulu	14
2. Perkampungan Masyarakat Pahandut yang Bermukim di Tepi Sungai Kahayan	23
3. Tugu Peletakan Batu Pertama yang Terletak di Jalan Ahmad Yani Palangka Raya	39
4. Bapak Semal Penyang Seorang Demang yang Masih Menjabat di Kecamatan Pahandut	45
5. Sandung Ngabe Soekah Pahandut yang Terletak di Jalan Darmo Sugondo Palangka Raya	48
6. Kantor Kecamatan Pahandut Terletak di Jalan Diponegoro Palangka Raya	51

ABSTRAK

Palangka Raya sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Tengah merupakan kota yang relatif muda dibandingkan dengan kota-kota lain di Kalimantan Tengah sendiri. Lahirnya kota Palangka Raya tidak terlepas dari latar belakang terbentuknya Propinsi Kalimantan Tengah, dan kemudian memilih kampung Pahandut sebagai lokasi ibukota Propinsinya.

Permasalahan yang timbul di sini adalah mengapa daerah Pahandut yang hanya merupakan suatu kampung tetapi dipilih sebagai lokasi ibukota sebuah Propinsi? Apa yang melatar belakangi terpilihnya kampung tersebut? Dan Bagaimana kedudukan Pahandut setelah ditetapkan sebagai Ibukota Propinsi

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengungkapkan sejarah kampung Pahandut dari awal berdirinya hingga dipilih dan ditetapkan sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Tengah.

Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang meliputi empat tahapan yaitu: Heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi, dengan langkah kerja studi pustaka, studi lapangan dengan teknik wawancara, analisis dan penulisan laporan.

Pada bab selanjutnya akan diuraikan tentang Lintasan Sejarah Pahandut yang diawali dengan pembahasan asal mula kampung dan nama Pahandut.

Dari cerita rakyat yang mengisahkan Bayuh dan Kambang mengembara mencari kehidupan baru. Di tempat yang baru mereka berhasil, sehingga diikuti oleh keluarga dan tetangga di kampung asalnya. Di kampung yang baru tersebut ada tokoh yang sangat disegani karena memiliki "kelebihan". Tokoh itu dipanggil dengan sebutan nama anak sulungnya yang bernama Handut. Setelah tokoh itu meninggal untuk mengenang jasanya maka kampung itu diberi nama kampung "Pak Handut" yang lama kelamaan lebih dikenal dengan nama Kampung "Pahandut".

Keluarga Gayuh dan Kambang yang diikuti oleh keluarga besar dan tetangganya, yang mula-mula menempati kampung itu merupakan penduduk asli Kampung Pahandut. Lama kelamaan kampung itu menjadi ramai dengan datangnya penduduk lain dari hulu Sungai Amuntai, Sungai Martapura, Palimbangan dan sebagainya.

Perkembangan Pahandut dari awal hingga sekarang terlihat sangat menyolok. Matapencaharian penduduknya yang dulu petani sekarang lebih banyak di bidang jasa dan perdagangan karena Pahandut sekarang hampir seluruh wilayahnya ada di perkotaan, meskipun transportasi sungai Kahayan masih sangat penting arti dan peranannya. Dari segi agama dan kepercayaan, dulunya menganut kepercayaan Kaharingan, sekarang bebas memilih agama atau kepercayaan yang disukainya. Sehingga sekarang ini banyak yang sudah menganut agama, tetapi masih ada juga yang tetap menganut kepercayaan nenek moyangnya. Untuk pola pemukiman dan susunan masyarakat sudah banyak berubah mengingat lokasi Pahandut ada di perkotaan.

Pada bab inti diuraikan tentang latar belakang terbentuknya Propinsi Kalimantan Tengah. Adanya tuntutan masyarakat Dayak Kalteng untuk memiliki propinsi otonom Kalimantan Tengah, yang diawali dengan pembentukan Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah (PPHRKT) pada tahun 1954. Diikuti dengan terbentuknya organisasi Gerakan Mandau Telawang Pancasila Sakti (GMTPS). Tuntutan ini dipenuhi oleh pemerintah pusat pada tanggal 28 Desember 1956.

Setelah terbentuk Propinsi Kalimantan Tengah kemudian timbul tuntutan dari beberapa daerah di Kalimantan Tengah seperti Pangkalan Bun, Sampit, Buntok, Pulang Pisau dan sebagainya untuk menjadi Ibukota Propinsi. Maka panitia pembentuk Propinsi Kalimantan Tengah dengan mendapat masukan dari beberapa tokoh Kalimantan Tengah memilih Pahandut sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan tengah dengan alasan :

- Alasan Politis : Demi keadilan dan menjaga agar jangan sampai terjadi keributan antar warga Kalimantan Tengah sendiri.
- Alasan geografis : Pahandut terletak di tengah-tengah wilayah Propinsi sehingga memudahkan proses kepemimpinan.
- Alasan ekonomis: Karena letaknya di tengah-tengah wilayah, sehingga biaya pengawasan, pengendalian dan perjalanan ke daerah lainnya tidak begitu tinggi.
- Alasan lainnya adalah bahwa Pahandut memiliki lahan yang luas, rata dan cukup keras sehingga tidak sulit bagi perluasan kota maupun pembangunan sarana dan prasarana jalan raya.

Alasan Lain karena ide Bung Karno yang ingin membangun kota

yang benar-benar baru bebas dari ancaman dan gangguan baik secara eksternal maupun internal, sehingga usul pemilihan Pahandut sebagai Ibukota segera diterima mengingat Pahandut terletak di tengah wilayah nusantara (alasan simbolistis). Setelah Pahandut ditetapkan sebagai lokasi Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah maka namanya dirubah menjadi Palangka Raya. Pengumuman itu disampaikan oleh Gubernur Milono dengan suatu upacara adat Dayak di Bukit Ngalangkang pada tanggal 18 Mei 1957. Palangka Raya diartikan tempat yang suci dan mulia yang besar sesuai cita-cita pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah. Pemancangan tiang pertama dilakukan oleh Presiden Soekarno sebagai tanda ditetapkan Palangka Raya sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah.

Daerah Pahandut dari masa ke masa mengalami beberapa kali struktur pemerintahan. Pada masa sebelum penjajahan, memiliki pemerintahan nonformal berbentuk kampung yang dipimpin oleh kepala suku. Cara pemerintahan diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus yang dinamakan dengan istilah hukum adat. Pada masa penjajahan ketentuan itu tetap berlaku, hanya istilahnya saja yang dirubah. Kepala kampung dinamakan pembekal. Jabatan di atasnya adalah Damang dan kemudian yang paling tinggi adalah Tamanggung. Mereka memiliki hak dan kewajiban, tugas dan wewenang yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun untuk penjajah sendiri memisah-misahkan wilayah atas afdeling dan onderafdeling.

Kemudian pada masa setelah kemerdekaan, seluruh afdeling dan onderafdeling dihapus. Bekas wilayah onderafdeling Beneden Dajak (yang di dalamnya termasuk daerah Pahandut) dipecah menjadi dua distrik, yaitu distrik Kapuas dan Distrik Kahayan. Distrik Kahayan dibagi lagi dalam dua onderdistrik yang salah satunya adalah onderdistrik Kahayan Tengah dan Pahandut sebagai ibukotanya.

Masa pemulihan kedaulatan dan Propinsi Kalimantan Tengah menjadi bagian integral dari wilayah NKRI, sebutan distrik diubah menjadi kawedanan dan onderdistrik diubah menjadi kecamatan, dan onderdistrik Kahayan Tengah berubah menjadi Kecamatan Kahayan Tengah dan Pahandut tetap menjadi ibukotanya.

Di era otonomi, Kecamatan Kahayan Tengah dimekarkan menjadi tiga kecamatan dan salah satunya adalah Kecamatan Pahandut, yang terdiri dari enam kelurahan. Dua diantaranya masih menhunakan

nama Pahandut yaitu Kelurahan Pahandut dan Kelurahan Pahandut Seberang.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan pada bab penutup bahwa Pahandut merupakan salah satu perkampungan tua dipertengahan wilayah Kalimantan Tengah. Oleh karena berbagai alasan (politis, strategis, ekonomis dan alasan lainnya) maka dipilih menjadi Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah dan kemudian namanya dirubah menjadi Palangka Raya. Itu sebabnya maka Pahandut merupakan cikal bakal lahirnya Kota Palangka Raya.

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Sejarah pada dasarnya merupakan catatan kolektif atas berbagai jawaban yang diberikan oleh setiap generasi terhadap permasalahan yang dihadapi pada suatu waktu tertentu. Hal demikian diperkuat oleh Kuntowijoyo dalam bukunya *Metodologi Sejarah* (2003: 157-160) yang menyebutkan bahwa sejarah itu adalah fakta dan bersifat diakronis, artinya bahwa sejarah itu memanjang dalam waktu. Selain itu juga bahwa sejarah itu empiris, yaitu bahwa sejarah itu bersandar pada pengalaman manusia yang sungguh-sungguh, bukan rekayasa.

Jika kita pelajari, Sejarah tentang pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah dan Sejarah Kota Palangkaraya juga merupakan catatan kolektif, fakta dan pengalaman dari para pelaku sejarah dari masyarakat Dayak terhadap persoalan eksistensi dan keberadaan mereka dalam wilayah pergaulan antar sukubangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulisan tentang latar belakang sejarah pada suatu daerah atau lokalitas tertentu memang mutlak diperlukan sebagai bagian dari rentetan penulisan sejarah Nasional. Oleh karena itu sekarang timbul apa yang disebut sejarah sosial, sejarah lokal, sejarah kontemporer dan sebagainya, dimana dalam penulisan itu selalu mengaitkan sejarah dari masa lampau sampai dengan masa kini yang terhimpun dalam satu rentang waktu yang panjang.

Begitu pun dengan penulisan tentang Pahandut (Pahandut = adalah nama (suatu daerah/tempat) merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kota Palangka Raya. Propinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan cikal bakal Kota Palangka Raya seperti sekarang ini. Penulisan ini dapat digolongkan dalam penulisan sejarah lokal, karena diawali dengan sejarah masa lampau sampai keadaan yang sekarang ini dan dalam lokalitas tertentu. Namun penulisan ini hanya dibatasi pada tinjauan sejarah sosial budaya dan politiknya saja.

Penulisan tentang Pahandut (Suatu Tinjauan Sejarah Sosial Budaya dan Politik), tidak dapat dilepaskan dari sejarah awal terbentuknya daerah yang bernama Pahandut itu dari sebuah dukuh kecil yang hanya berpenghuni satu keluarga. Karena letaknya yang

sangat strategis di tepi Sungai Kahayan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, maka lama-kelamaan menjadi ramai sebagai tempat persinggahan para pedagang dari hulu untuk menjajakan dagangannya ke hilir Sungai Kahayan ini.

Berbagai pergolakan politik yang terjadi menjelang dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia di berbagai daerah, khususnya di Kalimantan Tengah, mempengaruhi juga situasi dan kondisi politik di daerah ini (Pahandut). Suku Dayak yang merupakan bagian dari penduduk Indonesia telah lama berkeinginan untuk menunjukkan eksistensinya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diwujudkan dengan keinginan untuk memiliki daerah otonom sendiri. Dalam hal ini adalah memiliki satu propinsi yang dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan perjuangan yang sangat kuat, maka keinginan itu dapat tercapai pada tahun 1957, yaitu dengan resmi terbentuknya Propinsi Kalimantan Tengah, yang kemudian memilih kampung Pahandut yang dulunya sepi itu menjadi ibukota Propinsinya.

Dari sedikit uraian di atas, ada beberapa permasalahan yang muncul, diantaranya, mengapa daerah Pahandut yang dulunya hanyalah merupakan suatu padukuhan, kemudian berubah menjadi sebuah kampung, tetapi dapat dipilih sebagai ibukota sebuah propinsi. Apa yang melatarbelakangi terpilihnya kampung tersebut? Letaknya yang strategis, ataukah karena memiliki pembekal (kepala kampung) yang sangat terkenal? Kemudian bagaimana kedudukan Pahandut itu setelah ditetapkan sebagai ibukota Propinsi, dan bagaimana pula struktur pemerintahan yang selalu berubah dari waktu ke waktu.

Oleh karena itu, penulisan tentang Pahandut ini akan dimulai dari sejarah asal mula dan nama Pahandut. Kemudian dengan berbagai peristiwa yang terjadi di daerah ini, akhirnya daerah Pahandut dipilih dan ditetapkan menjadi ibukota Propinsi Kalimantan Tengah yang kemudian diberi nama Palangka Raya. Bagaimana cerita sejarah daerah Pahandut ini setelah ditetapkan sebagai ibukota propinsi dan berubah namanya menjadi Palangka Raya? Ternyata Pahandut terus berlanjut. Setelah terbentuk Propinsi Kalimantan Tengah dan Palangka Raya sebagai ibukotanya, kemudian membentuk Kotapraja Palangka Raya, dimana Pahandut menjadi salah satu kecamatan diantara tiga kecamatan lainnya, ternyata Pahandut tidak pernah hilang dari sejarah daerah ini. Kemudian penulisan Sejarah Pahandut ini akan dilanjutkan dengan

struktur pemerintahannya sejak awal mula sebelum bangsa penjajah datang di daerah ini, kemudian struktur itu berganti saat daerah ini kedatangan bangsa penjajah, pergolakan politik setelah kemerdekaan hingga struktur pemerintahan di Pahandut ini pada masa otonomi daerah dewasa ini.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penulisan tentang Pahandut ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat Pahandut serta melengkapi bahan untuk penulisan sejarah daerah dan sejarah nasional. Adapun secara umum, tujuan penulisan tentang Pahandut ini adalah sebagai salah satu usaha untuk menggali dan mengembangkan pengetahuan sejarah lokal sebagai unsur sejarah satu wilayah Indonesia yang ikut memberi corak kepada kebudayaan Nasional Indonesia. Hal ini didukung oleh pengertian bahwa sejarah Nasional Indonesia dibangun dari rekonstruksi sejarah lokal/daerah.

Adapun tujuan khusus dari penulisan ini adalah untuk mengungkapkan sejarah Pahandut dari awal berdirinya hingga perkembangannya seperti sekarang ini. Selain mengungkap tentang sejarah kota itu sendiri, penulisan ini juga menyoroti tentang keadaan Pahandut dilihat dari segi sosial, budaya dan politik yang mendukung perkembangan kota ini.

Hasil yang diharapkan dari penulisan ini adalah tersusunnya sebuah naskah laporan yang diharapkan dapat memberikan sepintas gambaran tentang sejarah Pahandut kepada para pengambil keputusan dalam membuat dan menentukan suatu kebijaksanaan di daerah ini

1.3. Metode dan Pendekatan

Dalam penulisan ini menggunakan Metode sejarah. Seperti diketahui bahwa dalam metode sejarah itu meliputi empat tahapan integral yaitu *heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi*. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Frederik (1991:13-18) dan juga senada dengan pendapat Nugroho Notosusanto yang menjelaskan bahwa metode sejarah adalah sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa daripada hasil-hasilnya.

Berangkat dari uraian di atas, maka langkah kerja yang dilakukan dalam penulisan ini adalah mulai dari studi pustaka, yaitu dengan jalan mencari/mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis dan data pendukung lainnya dari lokasi penelitian (di daerah Palangka Raya umumnya serta Kecamatan Pahandut dan sekitarnya) yang berhubungan dengan permasalahan ini.

Setelah mengadakan studi pustaka, langkah selanjutnya adalah melakukan studi lapangan, cara pengumpulan datanya dengan teknik wawancara kepada beberapa nara sumber/informan yang dianggap memahami dan dapat memberikan penjelasan tentang permasalahan yang ditulis. Informan yang dimaksud antara lain pegawai-pegawai dari instansi pemerintah terkait atau tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui tentang hal-hal yang berhubungan dengan daerah Pahandut.

Setelah data terkumpul, baik dari data tertulis ditambah dari berbagai keterangan dari beberapa nara sumber, kemudian dianalisis dan selanjutnya disusun menjadi sebuah laporan penelitian.

Diakui bahwa permasalahan inti dari metodologi dalam ilmu sejarah adalah masalah pendekatan yang dipakai. Memang dalam penulisan sejarah, kritik sejarah menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk menganalisa struktur dari suatu fenomena historis, sehingga hasil dari suatu penulisan sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakannya. Mengikuti perkembangan ilmu sejarah dewasa ini, maka dalam penulisan Sejarah Pahandut ini selain menggunakan pendekatan sejarah, juga menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial lainnya karena dalam penulisan ini akan diuraikan selain sejarah Pahandut itu sendiri, juga mengangkat Pahandut dari sudut pandang sosial budaya serta politiknya (struktur pemerintahan). Jadi jelasnya bahwa penulisan ini akan diarahkan pada penulisan sejarah sosial.

1.4. Telaah Sumber

Tidak ada yang lebih penting dalam suatu penulisan sejarah adalah membicarakan tentang sumber. Yang dimaksud dengan sumber di sini adalah sumber sejarah, yaitu peninggalan-peninggalan sejarah masa lampau yang masih bisa dilihat dan diamati sebagai bahan penulisan selanjutnya. Sumber sejarah yang dimaksud yaitu “bekas” yang ditinggalkan oleh peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau. Sedikit banyaknya “bekas” yang ditinggalkan oleh peristiwa sejarah

akan ikut menentukan kejernihan dari rekonstruksi peristiwa masa lampau. Jadi dapat dipahami bahwa dalam rekonstruksi sejarah Pahandut, tidak semua kejadian dapat digambarkan secara “utuh” dan tidak semua peristiwa yang sangat beragam yang terjadi di masa lampau layak dimasukkan ke dalam tulisan ini. Hal ini tentunya berkaitan dengan proses seleksi atau pemilihan sumber serta interpretasi dari penulis sejarah.

Bekas yang ditinggalkan sebagai sumber sejarah, selain berupa benda, juga berupa arsip atau peninggalan tertulis. Dapat diinformasikan di sini, bahwa selain peninggalan berupa benda yang sangat sedikit mengingat daerah Pahandut merupakan awal berdirinya Kota Palangka Raya, sehingga sebagai daerah baru kurang banyak benda-benda yang dapat dilihat kecuali bangunan-bangunan baru setelah daerah ini berubah atau dalam proses menjadi ibukota Propinsi Kalimantan Tengah.

Beberapa sumber yang dapat menunjang penulisan ini antara lain tentang buku-buku terbitan lama yang ditulis oleh Tjilik Riwut seperti *Kalimantan Memanggil*, *Kalimantan Membangun*, juga yang terbitan baru dari penulis yang sama yang disunting oleh Dra. Nila Riwut yang berjudul *Maneser, Panatau Tatu Hiang, (Menyelami Kekayaan Leluhur)*, Kemudian buku-buku sejarah terbitan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah seperti *Sejarah Kota Palangka Raya*, *Sejarah Sosial Palangka Raya*.. Selain itu, buku-buku/arsip dari Bagian Humas Pemerintah Kota Palangka Raya. Beberapa sumber lainnya yang cukup penting juga adalah sumber yang didapat dari Perpustakaan Kantor Gubernur Kalimantan Tengah (Arsip Daerah), Perpustakaan Negeri Palangka Raya, Bappeda Palangka Raya, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah, Kantor Camat Pahandut yang ikut melengkapi penulisan ini, ditambah beberapa literatur penunjang yang didapat dari beberapa informan yang ada relevansinya dengan permasalahan.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan tentang Pahandut Suatu Tinjauan Sejarah Sosial Budaya dan Politik ini akan diuraikan menjadi 5 (lima) bab dengan komposisi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang Permasalahan
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Metode dan Pendekatan
- 1.4 Telaah Sumber
- 1.5 Sistematika Penulisan

Bab II Lintasan Sejarah Pahandut

- 2.1 Asal Mula Kampung dan Nama Pahandut
- 2.2 Penduduk
 - 2.2.1 Penduduk Asli
 - 2.2.2 Penduduk Pendatang
- 2.3 Pertumbuhan dan Perkembangan Sosial Budaya Masyarakat
 - 2.3.1 Matapencarian
 - 2.3.2 Transportasi
 - 2.3.3 Agama dan Kepercayaan
 - 2.3.4 Pola Pemukiman
 - 2.3.5 Susunan Masyarakat

Bab III Pahandut dan Palangka Raya

- 3.1 Latar Belakang Terbentuknya Propinsi Kalimantan Tengah
- 3.2 Pahandut Dipilih Sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah
- 3.3 Pahandut dan Timbulnya Nama Palangka Raya
- 3.4 Perkembangan Pahandut Setelah Ada Palangka Raya

Bab IV Struktur Pemerintahan

- 4.1 Sebelum Masa Penjajahan.
- 4.2 Masa Penjajahan
 - 4.2.1 Tamanggung
 - 4.1.2 Damang
 - 4.1.3 Pembekal
- 4.3 Masa Setelah Kemerdekaan
- 4.4 Era Otonomi Daerah

Bab V Penutup

BAB II

LINTASAN SEJARAH PAHANDUT

Membicarakan tentang sejarah Pahandut, maka ingatan kita akan digiring ke masa lalu sekitar abad ke-17. Pada masa inilah sejarah tentang daerah atau kampung Pahandut ini mulai diceritakan orang. Oleh sebab itu untuk memulai menulis tentang lintasan sejarah Pahandut ini akan dimulai dengan asal-usul kampung dan nama Pahandut berikut kondisi sosial dan budaya pada masa itu yang meliputi penduduknya, agama dan kepercayaannya, pola pemukiman, mata pencaharian serta susunan dan tingkatan dalam masyarakat. Keseluruhannya itu akan diuraikan secara terperinci di bawah ini.

2.1 Asal Mula Kampung dan Nama Pahandut

Mulai disebutnya nama Pahandut berasal dari cerita rakyat yang secara turun temurun disebarluaskan dari mulut ke mulut dan ternyata sampai saat ini masih diakui kebenarannya bagi masyarakat setempat. Mengenai cerita tentang asal usul nama Pahandut ini selain diperoleh dari beberapa sumber tertulis, yang salah satu diantaranya adalah buku *Sejarah Kota Palangka Raya* yang ditulis oleh Tim Penulis Buku Sejarah Kota Palangka Raya, juga dikuatkan oleh keterangan beberapa informan yang diakui memiliki pengetahuan cukup baik tentang hal ikhwal sejarah dan budaya daerah ini.

Diceritakan pada awal abad ke-17 adalah pasangan suami-isteri yang bernama Bayuh dan Kambang. Pasangan suami-isteri itu berasal dari Bukit Rawi yang memutuskan untuk mencari kehidupan baru meninggalkan kampungnya dengan mendayung perahunya ke hilir menyusuri Sungai Kahayan. Mereka mengadu nasib, berusaha/*satiar* mencari kawasan lain untuk mengubah hidupnya tadi. Al hasil mereka singgah di danau sehak. Di sinilah mereka membuat pondokan (semacam rumah kecil nan sederhana) serta membuka ladang di sekeliling pondoknya. Akhirnya mereka merasa cocok di tempat yang baru tersebut sehingga kehidupan mereka menjadi lebih baik.

Kabar tentang tanah yang cocok untuk kegiatan pertanian serta perbaikan kehidupan pasangan suami-isteri tersebut akhirnya terdengar oleh warga masyarakat di Bukit Rawi di mana pasangan suami-isteri itu berasal. Akibatnya banyak sanak keluarga dan tetangga yang berasal

dari kampung tersebut dan bahkan warga dari kampung lain menyusul dan mengikuti jejak Bayuh dan Kambang pindah ke daerah baru tersebut dan membuka lahan pertanian seperti yang dikerjakan Bayuh dan Kambang.

Bisa dipastikan, akhirnya tempat yang baru tersebut berubah menjadi daerah yang ramai. Lama-kelamaan daerah tersebut berubah menjadi kawasan berusaha “*metik*” hasil hutan (bahasa Dayak Ngaju “*eka satiar*, sekaligus membuka lahan untuk bertani, yang disebut *eka malam*) kemudian berkembang menjadi tempat berusaha bertani dan berkebun lalu menjadi tempat pemukiman. Dalam bahasa Dayak Ngaju hal yang demikian dinamakan *eka badukuh*, para warga masyarakat setempat menyebutnya Dukuh *ain Bayuh*, singkatnya pemukiman ini disebut *Dukuh Bayuh*.

Begitulah Dukuh Bayuh itu semakin lama semakin ramai dan berkembang dengan pesat. Hal itu dikarenakan ternyata daerah atau tempat ini dan daerah di sekelilingnya memiliki sumber alam yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang bermukim di sana. Hasil hutan yang berlimpah di lokasi ini antara lain berupa damar, getah jelutung (*pantung*), getah hangkang, katiau dan rotan serta perairan sungai yang kaya dengan berbagai jenis ikan terutama di kawasan Dataran Aliran sungai Sebangau.

Selain lokasi itu, dataran pematang (tanah tinggi) terbentang dari Sungai Kahayan menuju Sungai Rungan disebut tangkin yang terkenal dengan nama Bukit Jekan, dengan tanah berbukit di Tangkiling pada kawasan tepi Barat Sungai Kahayan. Sedangkan di bagian Timur, terdapat danau besar yang bernama Danau Tundai dengan jumlah dan jenis ikan yang melimpah. Pada kawasan hulu dan hilir dari Dukuh Bayuh tersebut juga terdapat puluhan danau kecil yang banyak ikannya. Kesemuanya itu merupakan sumber mata pencaharian dan kehidupan warga Dukuh Bayuh sekaligus menjadi daya tarik bagi pendatang dari daerah lain untuk ikut berusaha di dukuh ini. Maka berubahlah Dukuh Bayuh yang semula hanya menjadi tempat berusaha yaitu bertani dan berkebun menjelma menjadi *lewu* (desa), dan Bayuh menjadi pembekal (kepala kampung/kepala desa) untuk yang pertama kalinya.

Dukuh Bayuh yang berkembang maju tersebut kemudian berubah menjadi kampung/desa dengan kehidupan warganya yang makmur dan sejahtera (2003:18-19).

Seiring waktu berjalan, ada cerita lagi yang berkaitan dengan keberadaan dukuh Bayuh tersebut. Diceritakan bahwa di Dukuh Bayuh tersebut terdapat seorang tokoh yang sangat disegani oleh seluruh warga masyarakat di dukuh itu. Tokoh yang disegani itu diceritakan karena memiliki kelebihan yang sangat menonjol. Dia dianggap memiliki kesaktian dan “ilmu” serta oleh masyarakat setempat dipercaya sebagai “orang pintar”. Masyarakat Dukuh Bayuh bahkan masyarakat dari daerah lain sering minta pendapat dan minta pertolongan pada sang tokoh tentang berbagai hal. Namun satu hal yang tidak terungkap di sini bahwa sang tokoh itu tidak seorang pun mengetahui namanya.

Diceritakan selanjutnya bahwa sang tokoh tersebut memiliki beberapa anak, dan yang sulung bernama Handut. Dan sesuai adat orang Dayak Ngaju yang menganut ajaran tektonomi, yakni pasangan suami isteri yang telah berumah tangga dan sudah memiliki anak, maka sang ayah atau sang ibu akan dipanggil/disapa secara akrab dengan memakai nama anak sulungnya. Maka tokoh Desa Bayuh yang “berilmu tinggi” itu sangat akrab dengan panggilan Bapa Handut.

Ketika usianya sudah lanjut, Bapa Handut sudah sering sakit-sakitan dan akhirnya sang tokoh tersebut meninggal dunia diiringi kesedihan dan isak tangis seluruh warga. Guna mengenang dan menghormati sang tokoh yang sangat berpengaruh tersebut, semua warga masyarakat setuju bahwa Desa Bayuh diubah namanya menjadi Desa Pahandut (yang berasal dari kata Bapa Handut – panggilan akrab sang tokoh). Adapun siapa nama asli sang tokoh tersebut, ternyata orang keturunan “aseli” Desa Pahandut pun sampai saat ini tidak dapat memberi jawaban (2003:19-20).

Selain cerita di atas, ada versi lain yang menceritakan tentang asal mula Desa Pahandut ini. Meskipun ada kesamaan bahwa Pahandut berasal dari Bapa Handut, namun memiliki alur cerita yang berbeda. Adapun alur cerita ini adalah sebagai berikut. Diceritakan, ada sebuah desa yang terletak di tepi Sungai Kahayan. Desa itu belum memiliki nama. Desa/kampung inilah tempat Bapa Handut dan warga lainnya bermukim. Di desa inilah merupakan tempat persinggahan orang-orang yang hilir mudik berdagang di Sungai Kahayan. Karena kemalaman, mereka sering menginap di tempat ini. Ketika ditanyai “dari mana?” (*bara kueh?*), atau pertanyaan “bermalam di mana” (*malem bi kueh?*),

maka jawaban yang sering didengar adalah “nyelu Pahandut” yang artinya “kampung Bapa Handut”, dan seterusnya berulang kali pertanyaan dan jawaban yang sama. Akhirnya nama Pa’ Handut (mulanya menunjukkan di tempat bapaknya Handut) menjadi Pahandut yang menunjukkan tempat (1992:60).

2.2 Penduduk

2.2.1 Penduduk Asli

Seperti telah dikemukakan pada cerita rakyat di atas bahwa pasangan suami-isteri Bayuh dan Kambang beserta keluarga bapa Handut dan keluarganya bukanlah orang atau keluarga yang sejak lahir tinggal dan bermukim di daerah ini. Namun demikian, mereka ini dianggap merupakan penghuni pertama di daerah atau desa ini. Keluarga Bapa Handut adalah penghuni mula-mula atau cikal Bakal di kampung tersebut. Setelah dikenalnya Bapa Handut dan keluarganya sampai di luar daerah, maka banyak berdatangan penduduk dari kampung lain menuju kampung ini dan memulai hidup baru bersama yang lain termasuk keluarga Pa’ Handut. Dari cerita para informan bahwa di Kampung Pahandut yang mulanya hanya terdiri dari beberapa keluarga akhirnya bertambah ramai dan telah berdiri sebanyak 8 (delapan) buah rumah panjang/ rumah *betang* (rumah adat, tempat hunian masyarakat Dayak). Jika satu *betang* dihuni oleh 5 (lima) keluarga, maka paling sedikit diperkirakan Kampung Pahandut pada waktu itu dihuni oleh 40 kepala keluarga. Ini berarti kampung ini sudah cukup ramai. Adapun desa-desa atau kampung-kampung yang ada di sekitar Pahandut antara lain kampung Bereng Bengkel, Jabiren Tumbang Nusa, Tumbang Rungan, Tanjung Sangalang, Penda Barania dan Bukit Rawi.

2.2.2 Penduduk Pendatang

Dalam sejarah panjang masyarakat Dayak khususnya di Propinsi Kalimantan Tengah pada masa lalu seringkali terjadi suatu pertentangan bahkan kadang-kadang terjadi pertumpahan darah diantara sesama suku Dayak di daerah ini. Untuk mencegah hal tersebut, Residen Kalimantan yang pada waktu itu berkedudukan di Banjarmasin mendorong Demang Batu untuk mengadakan rapat atau musyawarah tentang perdamaian di antara mereka yang diikuti oleh

seluruh tokoh dan pemimpin suku Dayak. Rapat besar itu sendiri disebutkan terjadi pada tahun 1894. Tujuan dari rapat atau musyawarah ini tidak lain adalah untuk menyeragamkan hukum adat Dayak yang menjadi pedoman bagi Suku Dayak di Kalimantan umumnya sehingga dapat mencegah mencegah pertentangan dan membuat perdamaian antara Suku Dayak itu sendiri. Di bawah ini adalah cuplikan ringkas peristiwa (kesimpulan) peristiwa Tumbang Anoi yang dikutip dari buku *Adat Istiadat Dayak Ngaju*

Pertemuan (hapumping) antar Suku Dayak bertempat di Desa Tumbang Anoi (wilayah/daerah Suku Dayak Ngaju) diikuti dan diawali oleh seluruh etnik Dayak Kalimantan (Borneo) termasuk dari Kalimantan Utara.

Hasil pertemuan telah dicapai kesepakatan/permufakatan perdamaian penghentian antar suku (kayau-mangayau) dan balas dendam. Penghentian "sistem budak" yaitu pembebasan perbudakan oleh kalangan/klas yang memelihara budak-budak. Budak-budak mendapat hak kemerdekaan. Berlakunya hukum adat dengan memberlakukan penyeragaman hokum adat dalam tata kehidupan suku Dayak, seperti dalam upacara kelahiran, perkawinan, kematian (tiwah, ijambe, wara dan lain-lain) sesuai suku masing- masing sebagai yurisprodency.

Adat kebiasaan pembayaran dengan budak (seperti dalam upacara perkawinan, perkelahian, kelahiran-kematian) diganti dengan denda dengan nilai uang atau barang benda berharga (emas, guci, gong, piring-mangkok dan lain-lain) (2003:141)

Karena tempat rapat atau musyawarah ini terletak di desa Tumbang Anoi, maka sampai sekarang terkenal dengan *Perdamaian Tumbang Anoi*. Akhirnya tempat ini pun menjadi tempat yang sangat bersejarah bagi Suku Dayak di Kalimantan umumnya dan di Kalimantan Tengah khususnya

Setelah perjanjian Tumbang Anoi tersebut, hasil dari musyawarah tersebut dapat dipetik hikmahnya. Tidak lagi terjadi pertentangan atau petumpahan darah diantara mereka. Akibatnya lalu lintas di aliran Sungai Kahayan menjadi semakin ramai. Penduduk di sekitar sungai tersebut semakin giat dan banyak yang mencari kayu, bijian, getah dan sarang madu di hutan-hutan pinggir sungai. Semua hasil kerja mereka diajakan ke udik. Kampung-kampung baru di sekitar Sungai Kahayan ini terus bermunculan, karena kedatangan orang dari hulu Sungai Martapura, seperti Amuntai, Negara dan Palimbangan. Belum terhitung penduduk dari daerah aliran sungai di hulu dan hilir Sungai Kahayan sendiri (Patianom dkk, 1992:60-61).

Karena banyaknya penduduk pendatang dari luar kampung inilah, maka Kampung Pahandut pun semakin hari semakin ramai. Pada masa periode Demang Sawang yang berkedudukan di hilir Sungai Kahayan, kampung ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nama-nama di bawah ini adalah sebagian dari mereka yang turut meramaikan Kampung Pahandut. Sebut saja Bajau dari Tumbang Tahang, Matal dari Pulang Pisau, Johannes Rasau, Ngabe Sukah dari desa Buntoi (Ngabe Sukah merupakan Pembekal pada waktu itu), Anging (bapa Faur dari Penda Barania) dan H.S Tujan dari Bukit Rawi.

Pendatang yang lebih jauh datang di kampung ini antara lain Usin dan Akhmad yaitu dari Amuntai di hulu Sungai Utara. Mereka berdua ini bersama Bajau dan Johannes Rasau membentuk pasar Pahandut yang pertama.

2.3 Pertumbuhan dan Perkembangan Sosial Budaya Masyarakat

2.3.1 Matapencaharian

Sebagian besar penduduk Kalimantan Tengah adalah suku Dayak. Dan seperti diketahui bahwa mata pencaharian penduduk asli Kalimantan pada umumnya dan penduduk/masyarakat suku Dayak adalah bertani dengan sistem ladang berpindah. Mengapa ladang berpindah? Pulau Kalimantan yang dikenal dengan luasnya dan kaya akan hasil hutan, sangat mendukung kegiatan penduduk dalam hal berpindah, termasuk dalam sistem bertani mereka. Sehingga tidak mengherankan apabila luas areal pertanian mereka itu terkadang tidak diketahui, karena setiap selesai musim panen mereka berpindah areal bertani mereka ke tempat lain secara berkelompok dan bergotong-royong.

Selain matapencaharian mereka yaitu bertani dengan sistem ladang berpindah, dengan luasnya wilayah di daerah ini, disertai dengan banyaknya hasil hutan, mata mata pencaharian mereka pun menjadi bertambah untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Perdagangan hasil hutan yang semakin lancar, membuat mereka semakin terpacu untuk menambah penghasilan, sehingga usaha sambilan seperti menoreh getah karet yang dilakukan di sela-sela musim bertani mereka menjadi pekerjaan utama juga. Justeru pekerjaan menoreh getah inilah yang akan cepat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan lain yang tidak dapat dihasilkan melalui bertani seperti membeli gula, minyak dan sebagainya.

Kecuali pekerjaan tersebut di atas yang sudah merupakan mata pencaharian mereka sehari-hari, berburu binatang adalah mata pencaharian mereka yang lain. Mereka memburu binatang untuk sekedar lauk pauk mereka sehari-hari, termasuk mencari ikan bagi mereka yang tinggalnya di tepi-tepi sungai. Pekerjaan berburu yang telah mereka tekuni dari dulu ini menyebabkan mereka terampil dalam hal menyumpit, karena sumpit inilah yang merupakan satu-satunya alat berburu mereka dengan anak panah yang telah mereka bubuhi dengan racun sehingga apabila buruan mereka kena sumpit akan segera mati.

Bagi masyarakat Pahandut khususnya, karena daerah tersebut berada di aliran sungai besar yaitu Sungai Kahayan, maka penduduknya pun umumnya bermukim di sepanjang sungai yang merupakan urat nadi perhubungan sekaligus urat nadi kehidupan. Oleh sebab itu, selain mata pencaharian mereka bertani dan berburu, juga sebagai nelayan/mencari ikan dan juga mengerjakan/membuat barang-barang kerajinan.

Untuk jenis-jenis mata pencaharian seperti tersebut di atas, masyarakat Pahandut sekarang ini justru tidak semua bisa dikerjakan, karena lokasi Pahandut yang sebagian besar berada di dalam wilayah perkotaan yang dapat dipahami bahwa lokasi pertanian sudah tidak memungkinkan lagi, termasuk berburu binatang. Sehingga mata pencaharian masyarakat Pahandut sekarang yang masih dikerjakan sejak dulu adalah mata pencaharian di bidang perikanan dan juga bidang kerajinan. Kalaupun masih ada yang bergerak di bidang pertanian, itu khususnya bagi mereka yang tinggal di luar wajah perkotaan yang terdiri dari dua kelurahan saja. Sedangkan di bidang kerajinan ini terutama kerajinan tangan yang banyak dihasilkan adalah anyaman rotan seperti tikar, topi dan wadah-wadah. Selain dari rotan, juga dari *gotah nyatu* (getah jelutung) dengan motif simbol keagamaan, manusia, hewan dan tanaman. Barang-barang hasil kerajinan ini selain diperjualbelikan untuk umum, juga sering diberikan kepada tamu terhormat sebagai kenang-kenangan atau souvenir.

Untuk saat ini mata pencaharian masyarakat Pahandut yang paling menonjol justru pada pelayanan jasa/bisnis, (pertokoan, angkutan, perhotelan, restoran, pasar) dan Pegawai Negeri Sipil.

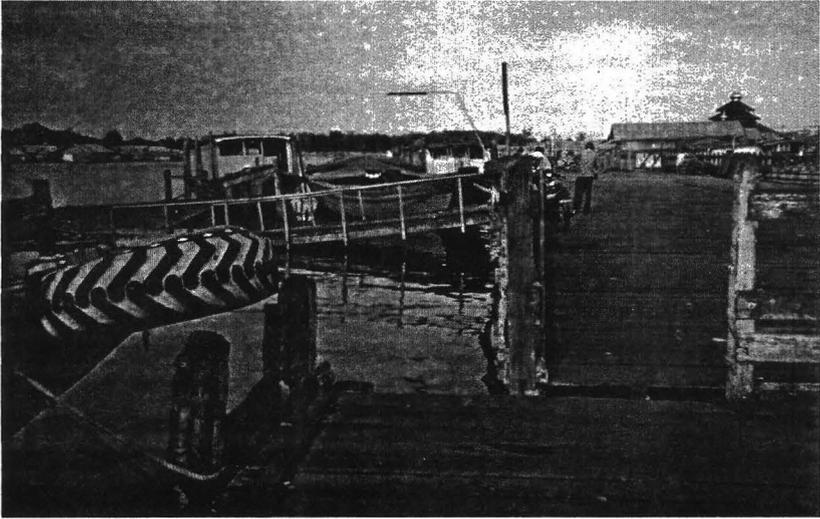


Foto 1
Pelabuhan Rambang di Kampung Pahandut Merupakan
Urut Nadi Perekonomian Masyarakat Pahandut Tempo Dulu

2.3.2 Transportasi

Lokasi Kampung Pahandut ternyata sangat strategis, selain terletak di tepi Sungai Kahayan, juga bermuara ke Kuala Kurun. Lalu lintas ekonomi di sungai menjadikan Kampung Pahandut sebagai *transit point* bagi lalu lintas air di sini, sehingga memiliki fungsi yang sangat penting. Fungsi sebagai daerah transit menjadikan kampung ini sebagai persinggahan orang-orang yang hilir mudik, ada yang berdagang, mencari getah, sarang madu, mencari kayu, berburu di hutan pinggiran sungai ini, dan sebagainya. Karena kemalaman, kemudian singgah dan menginap di sini. Di sinilah fungsi Pahandut pada saat itu sebagai daerah persinggahan atau daerah transit yang tidak dimiliki oleh daerah lain.

Fungsi yang tak kalah pentingnya di sini adalah tempat berpindahnya penumpang kapal-kapal dari Kuala Kurun yang akan menuju ke Sungai Kahayan. Seperti diketahui bahwa Sungai Kahayan terkenal dengan riam-riamnya yang sangat berbahaya bagi kapal-kapal atau perahu-perahu besar yang mengangkut barang-barang dagangan dari para petani. Sehingga apabila akan melanjutkan perjalanan

melewati Sungai Kahayan harus berganti kapal/perahu yang lebih kecil untuk menghindari bahaya riam tersebut. Memindahkan segala barang angkutannya yang memakan cukup banyak waktu menjadikan tempat ini semakin ramai dengan berbagai aktivitas yang lain bahkan harus beristirahat di tempat ini.

Di kampung ini akhirnya banyak terdapat bermacam-macam kegiatan ekonomi, banyak kegiatan pergaulan, munculnya pasar-pasar baru dan penginapan. Dengan banyaknya kegiatan baik kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial lainnya, menjadikan kampung ini semakin ramai. Orang-orang hilir banyak yang menjajakan dagangannya ke hulu, menjadikan banyak kampung baru bermunculan di daerah Pahandut ini. Sehingga penduduk Pahandut mengalami perkembangan yang sangat pesat.

Dalam perkembangan selanjutnya, dermaga yang dijadikan tempat untuk persinggahan sekaligus untuk memindahkan barang-barang dagangan seperti tersebut di atas semakin kari semakin besar dan semakin ramai saja. Dermaga inilah pada saat sekarang ini dijadikan pelabuhan di Pahandut khususnya dan di Kota Palangka Raya umumnya dan kemudian namanya bukan lagi dermaga, melainkan menjadi sebuah pelabuhan. Dan bagaimana awal ceritanya hingga sekarang ini pelabuhan yang terletak di Kampung Pahandut ini dinamakan Pelabuhan Rambang.

Pada saat ini, Pelabuhan Rambang menjadi tempat yang sangat penting sebagai jalur masuknya orang-orang baik pedagang maupun pendatang ke Palangka Raya khususnya melalui jalur transportasi air. Dengan perkembangan seperti di atas menjadikan Pahandut yang semula sebagai kampung legendaris berubah menjadi daerah yang dipandang sangat penting di “Kalimantan Tengah”.

2.3.3 Agama dan Kepercayaan

Pada mulanya penduduk Pahandut yang relatif sedikit memeluk agama *Helo* yang dalam perkembangannya menjadi *Kaharingan* dan selanjutnya menjadi sebuah sekte dari agama Hindu Kaharingan. Pada tulisan ini akan dibahas tentang kepercayaan masyarakat Pahandut ini dari awalnya hingga perkembangannya sekarang ini. Mengapa perlu membahas tentang agama Kaharingan di sini?. “Agama” Kaharingan

ini merupakan agama asli Suku Dayak di Kalimantan Tengah. Hal ini perlu dibahas karena untuk memahami adat-istiadat serta kebiasaan-kebiasaan Suku Dayak, agama atau kepercayaan mereka ini dapat membantu menjelaskannya.

Pada setiap agama atau kepercayaan apapun, tentu memiliki bentuk kepercayaan sendiri-sendiri. Namun dari semuanya itu, ada diantaranya kesamaan, yang antara lain adalah bahwa mereka percaya adanya Penguasa Tertinggi (Tuhan). Begitu pun yang terjadi dalam “agama” atau kepercayaan Kaharingan. Dalam buku Monografi Daerah Kalimantan Tengah (1979:21) dikemukakan bahwa di dalam kepercayaan Kaharingan alam ini terbagi atas dua bagian yaitu **alam atas** dan **alam bawah**. Tiap-tiap bagian memiliki penguasa-penguasa tertinggi, tetapi pada suatu masa kedua penguasa itu dapat bersatu dalam suatu bentuk baru (dwi tunggal).

a. Alam Atas (Upperworld)

Alam atas ini dalam bahasa Dayak Ngaju disebut *Tasik Banteran Bulau Laut Babandan Intan* ‘Danau berkemilauan emas. Laut berjembatan Intan’. Penguasa dari alam atas ini memiliki berbagai nama, antara lain:

- **Bungai** atau **Tingang**, nama burung sakti dalam mitologi Dayak, berkelamin jantan.
- **Raja Tantong Matan Andau, Kanarohan Tambing Kahanteran Bulan** ‘Raja penjuru Matahari, Pangeran Kelengkapan Bulan’.
- **Mahatara** atau **Ranjing Mahataran Langit**.
- **Mahatala** yang sehari-hari disebut **Hatala**.

Dari nama-nama itu terlihat kemungkinan adanya pengaruh dari agama Hindu maupun Islam, tetapi terbatas hanya pada nama saja, tidak atas konsep mengenai pengaruh maupun konsep-konsep lainnya dari kepercayaan asli Suku Dayak tersebut.

b. Alam Bawah (underworld)

Alam Bawah ini disebut *Basuhun Bulau Saramai Rabia* ‘sungai emas, pengaliran segala kekayaan’. Penguasa tertinggi di alam bawah ini memiliki dua nama yaitu:

- **Tambun Naga**, ular sakti seperti naga, berkaki yang di dalam mitologi Dayak melambangkan jenis kelamin betina.

- Bawin Jata Balawang Bulau, 'Wanita Jata berpintukan emas' yang bisa juga disebut Jata atau Dewata (dalam bahasa Dayak Ma'anyan).

Kedua penguasa alam atas dan alam bawah ini dapat bersatu dalam bentuk yang dinamakan **Tambun Haruai Bungai** 'naga berjiwakan garuda' atau **Raja Tontong Matanandau, Kanarohan Tambing Kabanteran Bulau** 'Pangeran Matahari Raja daripada Bulan'. Di dalam penyatuan itu, bersatulah sifat ganda yang menggambarkan sifat yang baik berhadapan dengan yang jahat, hidup dan mati, gelap dan terang, jantan dan betina.

Selanjutnya masih dijelaskan bahwa di dalam kepercayaan Kaharingan, masih terdapat penguasa-penguasa perantara yang sebenarnya adalah wakil dari kedua penguasa tertinggi tersebut yang menggambarkan sifat yang saling bertentangan itu. Penguasa-penguasa perantara itu antara lain:

- **Raja Pali** : Yang bertindak apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran adat dan hukum-hukum pali (tabu).
- **Raja Ontong** : Yang mengatur sumber rejeki, kekayaan dan kemakmuran manusia.
- **Raja Sial** : Yang mendatangkan segala kerugian, kesusahan, kesialan dan kematian.
- **Raja Hantuan** : Yang mendorong segala bentuk kesusahan kepada manusia. Taja Hantau ini dikatakan sebagai peminum darah dan dianggap dapat mewujudkan diri seperti manusia biasa. Dalam kepercayaan orang Dayak membentuk golongan tersendiri "**Golongan Hantuan**".
- **Raja Peres** : Yang menyebarkan segala macam penyakit menular.

Di samping itu, kepercayaan Kaharingan juga percaya bahwa di sekeliling alam ini terdapat pula tiga macam roh, yaitu:

- a. Roh-roh yang baik, yang terpenting diantaranya ialah **Tempon Telon** (pengantar roh orang meninggal menuju ke **Lewu Liau**). Sangumang (tempat orang minta pertolongan dalam kecelakaan, kesukaran dan sebagainya).

Antang Bajela Bulau (elang berlidah emas, sebagai pemberi/pertanda dan perlindungan sebelum dan selama perjalanan, mengerjakan pekerjaan/tindakan penting) dan **Jarang Bawahan** (tempat minta kekuatan dan keberanian kepahlawanan).

- b. Roh-roh yang jahat seperti **Kuniak** (kuntulanak), **Kria** (yang biasa menyesatkan orang), **Kloe** (penjaga tanah) dan **Kukang** (roh yang suka menghalang-halangi perjalanan orang yang sedang menuju ke **Lewu Liau**. Mereka yang di dunia hidup baik, akan dapat mengatasi halangan ini, tetapi bagi yang jahat semasa hidupnya, akan mendapat halangan dan siksaan dari Kukang ini.
- c. Roh-roh nenek moyang. Walaupun roh-roh ini telah di antar ke **Lewu Liau**. Setelah selesainya upacara Ijambe dan Tiwah, mereka sewaktu-waktu dapat dipanggil untuk memberikan pertolongan kepada anak keturunannya yang sedang kesusahan.

Dalam kepercayaan Kaharingan, agar dapat lepas dari pengaruh-pengaruh dan gangguan-gangguan roh jahat, ataupun agar memperoleh keuntungan, kebahagiaan hidup dan keselamatan di dunia dan akhirat, manusia harus hidup baik, tidak melanggar pali, dan tidak pernah lupa memberikan persembahan-persembahan kepada para roh, para penguasa perantara dan penguasa-penguasa tertinggi. Upacara pemberian persembahan ini dapat dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, tetapi pada umumnya dengan bantuan para **balian** atau **Shaman** (Imam-Pendeta). Seorang Balian bukan saja diminta untuk memimpin upacara-upacara kematian (**ijambe-tiwah**), tetapi dapat juga menyembuhkan orang sakit. Adakalanya seorang balian diminta bantuannya untuk melakukan black magig (memasang guna-guna atau sihir).

Untuk menjadi seorang balian tidak mudah, karena kepercayaan Kaharingan tidak memiliki kitab suci (tertulis) dan ayat-ayat suci agama Kaharingan diungkapkan dalam bahasa **Sangen/Sangiang**. Sebagian besar berupa mantera-mantera/ doa-doa yang harus dihafalkan di luar kepala. Oleh sebab itu, profesi sebagai seorang balian biasanya diturunkan kepada anak atau cucunya.

Dengan masuknya agama Kristen di pedalaman Kalimantan Tengah yang dibawa oleh Zending Amsterdam pada tahun 1924, banyak masyarakat yang dulunya menganut kepercayaan Kaharingan ini berpindah menganut agama Kristen. Tahun 1926 didirikan sekolah standart oleh misi Zending ini, sehingga banyak orang Dayak yang menjadi pandai, bahkan ada yang menjadi guru dan akhirnya mendirikan/membentuk pakat guru Dayak yang dipimpin oleh H. Sima, H. Nyangkal dan T.A Pahu. Pada tanggal 24 April tahun 1935

berdasarkan besluit No. 33 Stbld No. 217 tahun 1927 Lembaga Gereja Dayak dan Gereja Dayak Evangelis diresmikan dan pada tahun 1950 Gereja Evangelis berubah menjadi Gereja Kalimantan Evangelis.

Dengan berkembangnya agama Kristen di sini, bukan berarti kepercayaan seperti Kaharingan kemudian hilang dan lenyap. Pengaruh Tumenggung yang sangat menentukan dalam mengkristenkan orang Dayak memang sedikit banyak mengurangi penganut kepercayaan Kaharingan ini. Namun demikian, meskipun mereka telah menganut agama Kristen, namun adat-istiadat yang diajarkan dalam ajaran kepercayaan Kaharingan tetap mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perkembangan selanjutnya seperti sekarang ini, mereka/masyarakat diberi kebebasan untuk memilih apakah tetap menganut kepercayaan Kaharingan ataukah memeluk agama Kristen atau yang lainnya. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Demang di Kecamatan Pahandut yang bernama **Semal Penyang** bahwa masyarakat Pahandut sekarang ini maupun masyarakat Palangka Raya bebas menentukan agama dan kepercayaannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bahkan Bapak Demang Semal Penyang pun sampai saat ini masih tetap menganut kepercayaan Kaharingan. Tidak ada paksaan baik dari pemerintah maupun penguasa setempat. Dari sini sehingga dapat dilihat bahwa pemeluk kepercayaan Kaharingan di Kalimantan Tengah umumnya dan di daerah Pahandut khususnya masih nampak, dan mereka dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai.

2.3.4 Pola Pemukiman

Pola pemukiman yang dimaksud dalam bab ini adalah tempat hunian bagi sekelompok orang/masyarakat pada suatu tempat tertentu. Pada masa lalu, masyarakat Dayak dikenal hidup dalam satuan rumah-rumah yang dinamakan rumah *betang/betang panjang*. Rumah panjang bagi suku Dayak tidak dapat disamakan dengan rumah petak yang bentuknya panjang. Sebab rumah panjang memiliki karakteristik yang unik baik secara fisik maupun sosial. Seperti halnya pola pemukiman masyarakat Dayak pada umumnya, pola pemukiman masyarakat di Kampung Pahandut pada zaman dahulu juga berupa/bernama "betang". Dalam bahasa Dayak Ngaju, Betang juga disebut "*huma hai*" yang artinya rumah besar. Dan akhirnya dalam bahasa umum betang kemudian diartikan sebagai rumah panjang, rumah yang berbentuk

panggung dan memiliki beberapa pintu dan bilik untuk tempat hunian beberapa kepala keluarga dengan berbagai vasilitas sederhana sebagai keperluan sebuah keluarga besar.

Di Kampung Pahandut sendiri menurut catatan/notulen rapat Tumbang Anoi (tahun 1894) tercatat ada sebanyak 8 (delapan) buah rumah panjang (betang) yang tersebar di seluruh kampung tersebut. Namun demikian betang-batang di Kampung Pahandut ini tidak begitu besar, yakni hanya dihuni oleh kurang lebih 5 (lima) kepala keluarga saja.

Perlu juga dikemukakan di sini bahwa istilah kampung adalah desa dalam bahasa Dayak. Istilah desa tidak populer di dalam masyarakat Dayak. Adapun keterangan kampung di sini seperti yang dikemukakan oleh Tjilik Riwut dalam bukunya *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaanannya* antara lain: Jarak dari kampung ke kampung lainnya, pada umumnya berjauhan dan terpencar. Begitu pula letak rumah-rumah penduduk biasanya terpencar-pencar. *Batang* atau rumah panjang banyak ditemukan. Biasanya sebuah perkampungan besar, memiliki empat sampai lima anak kampung (dukuh) dengan jarak yang sangat jauh. Anak kampung yang terpencil letaknya lebih jauh ke pedalaman, yaitu di gunung, lembah, tepi sungai bahkan di hutan (Tjilik Riwut, 1993:285).

Akan tetapi, sistem rumah panjang ini kemudian banyak dikecam sebagai bentuk/sistem perumahan yang tidak sehat dan rawan terbakar. Maka banyak rumah panjang sebagai tempat tinggal masyarakat dayak ini banyak dimusnahkan termasuk di wilayah hunian masyarakat di Kampung Pahandut. Akhirnya pada saat sekarang ini sistem perumahan mereka sebagian besar dengan sistem rumah tunggal. Selain alasan tersebut, ada alasan lain sehingga masyarakat Kampung Pahandut terpaksa harus menempati rumah tunggal, yaitu karena perkembangan alamiah. Komunitas rumah panjang terus tumbuh dan bertambah terus dan akhirnya sampai pada tingkat maksimal, sehingga rumah panjang tidak memadai lagi sebagai tempat tinggal. Pada saat inilah dirasakan perlu untuk melakukan perluasan daerah pemukiman disertai lahirnya komunitas baru, apalagi letak wilayah ini sebagian besar berada di perkotaan..

Meskipun secara teritorial rumah-rumah mereka terpisah, namun secara spiritual tetap sebagai kesatuan dalam perlindungan tokoh/leluhur yang sama. Hal ini sangat dipengaruhi oleh peran rumah

panjang sebelumnya sebagai lembaga pemersatu untuk menjaga dan memelihara kekeluargaan serta adat dan nilai-nilai luhur yang bersumber dari kepercayaan mereka yang diturunkan oleh **Ranying Hatala Langit** (Tuhan, Pencipta langit dan bumi menurut kepercayaan masyarakat setempat). Kekeluargaan itu begitu kuat dalam persekutuan rumah panjang, karena semua ini diikat dalam hubungan geneologis dalam sistem kekerabatan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk aktivitas kehidupan rumah panjang yang melibatkan semua penghuni. Setiap penghuni merasa memiliki sekaligus bertanggung jawab dalam setiap aktivitas sebagai bukti dari solidaritasnya yang tinggi. Rasa memiliki dan bertanggung jawab ini merupakan dambaan bagi setiaparganya. Dengan kata lain, solidaritas sosial rumah panjang berpusat pada "hubungan darah" (geneologis). Suatu yang tidak terdapat pada masyarakat yang lebih luas. Ikatan geneologis ini mewujudkan rasa hormat dan kepercayaan satu sama lain, yang merupakan pendukung dan penopang solidaritas sosial. Hal ini telah mereka lakukan secara turun-temurun dan bahkan merupakan kebiasaan baku yang terus dipelihara kelestariannya.

Nilai budaya yang kokoh dan luhur ini menjadi pedoman hidup mereka dan mengikat setiaparganya. Nilai-nilai itu tampak dalam norma-norma, kebiasaan ataupun hukum-hukum adatnya sebagai suatu tata tertib yang menjamin kehidupan bersama yang sesuai dengan kepercayaan mereka. Inilah yang menjadi sumber moralitas keluarga dan masyarakat.

Cara memelihara dan menjaga keserasian,, keharmonisan dan keseimbangan hidup dalam rumah panjang yaitu dengan memberikan kedudukan dan tanggung jawab yang sama kepada setiaparganya. Setiap keluarga atau warga dapat memelihara keserasian, keharmonisan dan keseimbangan hidup dengan mentaati hukum 'adat.

Begitu besar pengaruh sistem rumah panjang yang pernah mereka rasakan dahulu, hingga sekarang setelah mereka menempati sistem rumah tunggal, kehidupan dalam keseharian mereka masih tampak seperti kehidupan rumah panjang. Kebersamaan, kekeluargaan, tanggung jawab dan solidaritas mereka ternyata masih sangat mereka junjung tinggi. Hal ini terutama sekali dirasakan di daerah pedesaan. Namun bagi mereka yang sudah bermukim di perkotaan dan bercampur dengan beberapa etnis pendatang, rasanya solidaritas seperti tersebut di atas sudah banyak berkurang.

Selain rumah betang yang sangat terkenal dalam masyarakat Dayak, di sini juga dikenal beberapa jenis tempat hunian terutama bagi masyarakat yang tinggal di tepian sungai antara lain seperti yang ditulis M. Usop, MA. Jenis-jenis tempat hunian rumah mereka itu antara lain:

- a. *Rumah mula-mula*. Rumah ini tidak bertiang, berlantai dekat tanah dan beratap ilalang atau kulit kayu. Bentuk ini diperkirakan dari masa sebelum adanya *asang kayau* (merampok dan membunuh) dan menunjukkan bahwa mereka pada mulanya berdiam di dataran tinggi atau pegunungan dan baru menyebar ke hilir.
- b. *Huma pangun hambujur* adalah bentuk rumah selanjutnya yang dibangun membujur menghadap sungai. *Tiang tabalien* (kayu ulin) persegi empat belum berapa tinggi, masih di bawah dua meter, tetapi cukup memungkinkan bagi mereka melakukan berbagai aktivitas di bawah rumah.

Di bawah rumah biasanya terdapat kandang ternak (babi, ayam), puputan untuk mengolah tanaman (besi) dan *lisung* (lesung) untuk menumbuk padi serta *pasah parey* (lambung). *Baun tunggal* (pintu) dan *basengok* (jendela) dibuat secukupnya. Biasanya rumah semacam ini dihuni antara dua sampai tiga keluarga batih. Atapnya *tingen* (ilalang) yang katanya tahan sampai sepuluh tahun.

- c. *Huma gantung*. Rumah bentuk ini tiangnya nahapas lunju (tak sampai tombak, kurang lebih empat meter). Rumah bentuk ini muncul sekitar tahun 1914 ketika mulai berkecamuk *asang kayau*.

Seiring berjalannya waktu, tempat hunian seperti rumah betang ini dan bentuk-bentuk rumah seperti di atas semakin banyak ditinggalkan orang, dan di daerah Pahandut sendiri, sudah tidak ada lagi bangunan betang yang masih berdiri. Penghuninya cenderung hanya satu keluarga batih saja. Bentuk rumah sudah disesuaikan dengan kondisi lokasi, dengan pondasi batu dan model dan tipe bangunannya sudah banyak yang modern. Bagi penduduk yang masih bermukim di tepi sungai, bangunannya sudah mulai berubah baik bentuknya, bahan maupun modelnya. Kalau dahulu ruangan hanya terdiri dari kamar tidur, ruang depan dan ruang dapur, namun sekarang sudah memiliki beberapa ruangan/kamar yang sesuai dengan kebutuhan.

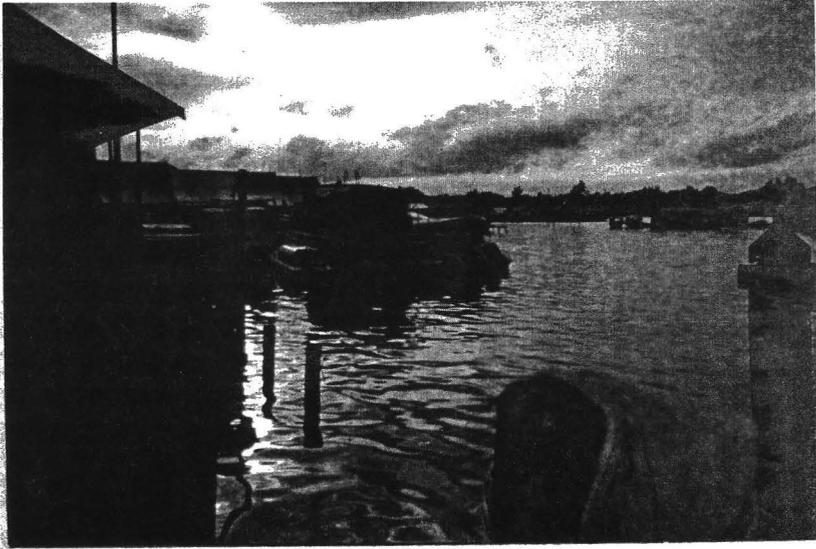


Foto 2
Perkampungan Masyarakat Pahandut Yang Bermukim
di Tepi Sungai Kahayan

2.3.5 Susunan Masyarakat

Membicarakan tentang susunan masyarakat, dalam bukunya Tjilik Riwut (2003:111) dikemukakan bahwa tingkatan masyarakat Dayak dibagi menjadi 7 (tujuh) kelas yaitu:

- a. **Orang Bangsawan**, golongan orang yang dapat menarik pajak dari bawahannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. **Orang Pantan**, penduduk asli yang dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari diusahakan sendiri.
- c. **Orang Merdeka** adalah keluarga jauh para kepala kampung. Mereka dibebaskan dari kewajiban membayar pajak.
- d. **Orang Jipen**, yaitu golongan budak yang tidak memiliki harta benda, sehingga seluruh kebutuhannya disediakan oleh majikannya.
- e. **Orang Abdi**, yaitu orang-orang yang dibeli.
- f. **Orang tangkapan** atau tawanan.
- g. **Orang Tamuei** atau orang asing. Bukan penduduk asli (pendatang) dengan alasan dagang. Tetapi selama berada di kampung Dayak harus tunduk pada aturan yang ada.

Dari banyak tingkatan atau susunan masyarakat tersebut di atas, menurut Patianom dkk (1992: 13-14) dapat diringkas menjadi tiga kelas saja yaitu:

- a. **Utus Gantung** (keturunan atau golongan tinggi), yaitu kaum kerabat dari pimpinan masyarakat, seperti *Tamanggung, dambung, mangku, jaga dan damang*. Sebelumnya, damang disebut juga kepala adat. Setelah keluarnya Surat Keputusan (Besluit) Residen Daerah Selatan dan Timur Pulau Borneo No. 349/C-7-1 tanggal 23 Oktober 1938, dipergunakan istilah *damang (demang), singa, pangkalima dan mantir*. Mereka ini adalah kelompok orang yang pintar (*harati*), kaya (*tataw*), perkasa (*mentong*), terkenal (*basewut*), dan menduduki tempat kelas atas dan termasuk golongan bebas.
- b. **Utus Randah** (keturunan atau golongan rendah) yang umumnya orang-orang biasa tetapi bebas.
- c. **Utus Jipan** (keturunan atau golongan budak). Pada golongan ini masih dibagi lagi menjadi:
 - **Jipan Kabalik**, tawanan dalam perang suku karena dipekerjakan dan mengabdikan untuk kepentingan majikan
 - **Jipan Tantumah**, bertugas mengawasi jipan kabalik, tetapi belum bebas. Mereka tetap diawasi dan bertanggung jawab kepada majikannya.
 - **Rowar**, orang yang berhutang dan tidak mampu membayar. Tugas mereka baik yang wanita maupun yang laki-laki adalah mencari harta dan mengayau. Disamping itu rowar bertugas sebagai penghibur apabila ada upacara. Mereka pada umumnya dilatih khusus pada bidang kesenian.
 - **Pangin**, orang-orang yang sudah bebas, tetapi masih senang tinggal di tempat majikannya.

Akibat perkembangan zaman, maka terjadi perubahan dalam hal kelas sosial ini. Yang jelas saat ini tidak ada lagi kelas-kelas yang membatasi hubungan dalam masyarakat. Tidak ada kelas bangsawan maupun budak. Tidak ada golongan atas dan golongan bawah. Sehingga dalam kehidupan masyarakat tidak ada yang memiliki hak lebih tinggi dari yang lain. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama antara satu dengan yang lainnya. Lebih-lebih di daerah Pahandut yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah perkotaan.

BAB III

PAHANDUT DAN PALANGKA RAYA

3.1 Latar Belakang Terbentuknya Propinsi Kalimantan Tengah

Seerti diketahui bahwa Propinsi Kalimantan Tengah baru terbentuk menjadi propinsi otonom setelah belasan tahun (tepatnya dua belas tahun) setelah Indonesia merdeka. Terbentuknya propinsi ini pun tidak serta merta terbentuk dengan mulus dan mudah, melainkan dengan perjuangan dan kerja keras seluruh warga masyarakat Dayak yang memang merupakan masyarakat asli di propinsi tersebut. Latar belakang pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah tersebut akan diuraikan seperti yang telah dikemukakan dalam *Buku Sejarah Kota Palangka Raya* (2003:1-8), juga yang dituturkan oleh Bapak Tigel Jelau dapat diringkas sebagai berikut.

Sebagai warga asli, keinginan masyarakat Dayak untuk menunjukkan eksistensinya di bumi nusantara ini yang diwujudkan dengan keinginan untuk memiliki daerah otonom sendiri sudah muncul sejak lama. Sejalan dengan tingkat perjuangan pergerakan nasional menuju kemerdekaan Indonesia yang sangat bergelora menjelang abad ke-20, dan secara nasional ditandai dengan tuntutan "Indonesia Berparlemen". Di daerah Kalimantan Tengah, perjuangan itu dimulai dengan terbentuknya organisasi yang bernama **Pakat Dayak** (PD) yang didirikan oleh warga suku Dayak Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Mahar Mahir. Organisasi Pakat Dayak ini mengeluarkan resolusi mendukung tuntutan Gabungan Partai-Partai Politik Indonesia (GAPKI) demi terlaksananya Indonesia Berparlemen seperti yang dicita-citakan oleh partai-partai politik tersebut.

Resolusi yang dikeluarkan oleh organisasi yang bernama Pakat Dayak tersebut disampaikan langsung kepada anggota *volksraad* atau *Tim Komisi Visman* yang dipimpin oleh R.A.A Soejono yang pada waktu itu datang di Banjarmasin pada akhir tahun 1940. Resolusi yang disampaikan oleh Ketuanya yaitu Bapak Mahar Mahir dan didampingi oleh sekretaris PD E.S Handuran itu juga berisi tuntutan terbentuknya Daerah Otonom bagi Tanah Dayak. Akan tetapi ternyata resolusi itu tidak mendapat tanggapan konkrit, melainkan hanya diberikan janji akan dibentuk kantor *Adviseur Voor Da Jakse Zaken* di Banjarmasin yang dikatakan sebagai langkah pertama untuk persiapan menuju

terbentuknya suatu propinsi otonom Dayak di Kalimantan. Namun janji tersebut tidak terlaksana sampai Pemerintah Hindia Belanda menyerah kalah tanpa syarat kepada Tentara Dai Nippon (Jepang) pada tanggal 8 Maret 1942.

Pada masa pendudukan Jepang yang hanya mencapai kurun waktu kurang lebih 3,5 tahun lamanya, ternyata dirasakan lebih kejam dari penjajahan Belanda yang berlangsung selama 3,5 abad. Hal ini terjadi hampir di seluruh nusantara merasakan kekejaman Jepang, tak terkecuali masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Hingga akhirnya kemerdekaan dapat diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945, meskipun pada saat itu belum dirasakan oleh masyarakat di Kalimantan Tengah.

Lima tahun setelah proklamasi kemerdekaan yakni sesudah pemulihan kedaulatan yang ditandai adanya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 14 Agustus 1950. Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 yang menetapkan pembagian wilayah RIS yang hanya meliputi sepuluh propinsi (Propinsi Administratif), yang salah satu diantaranya adalah Propinsi Kalimantan. Sedangkan Propinsi Kalimantan itu sendiri dibagi lagi atas tiga karesidenan, yaitu Karesidenan Kalimantan Kalimantan Timur, Karesidenan Kalimantan Selatan dan Karesidenan Kalimantan Barat. Untuk eks Daerah Otonom Dayak Besar dan Swapraja Kotawaringin dibentuk menjadi tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito dan kabupaten Kotawaringin, yang sama-sama Daerah Otonom Daerah Banjar dan Federasi Kalimantan Tenggara, digabungkan ke dalam keresidenan Kalimantan Selatan.

Setelah terbentuk Propinsi Administratif Kalimantan tersebut, maka sejak tahun 1952 muncullah tuntutan-tuntutan dari tiga wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas, Barito dan Kotawaringin. Adapun tuntutan itu agar ke tiga kabupaten tersebut digabung dan dibentuk menjadi satu propinsi otonom dengan nama Propinsi Kalimantan Tengah. Tuntutan itu terus menggelora yang kemudian disampaikan baik kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kalimantan melalui jalur demokrasi oleh partai-partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang terbentuk di Kalimantan Tengah pada waktu itu. Satu tahun kemudian, **Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI)** yang melangsungkan kongres di Bahu Palawa (masuk ke dalam wilayah

Kecamatan Kahayan Tengah) pada tanggal 15 s/d 22 Juli 1953 mengeluarkan mosi Nomor 1/Kong/1953 yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat casuquo Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan dan Residen Kalimantan Selatan, yang inti dari mosi tersebut adalah mendesak agar tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Barito, Kapuas dan Kotawaringin, agar dapat disatukan dalam satu propinsi, yakni Propinsi Kalimantan Tengah. Kongres itu dipimpin oleh Damang Sahari Andung, salah seorang tokoh Dayak yang berasal dari daerah Tangkahan.

Tuntutan tentang pembentukan Propinsi Otonom Kalimantan Tengah yang pada waktu itu meliputi tiga kabupaten semakin kuat dan jelas karena keinginan seluruh rakyat yang terus menggelora. Pada awal tahun 1954, para warga masyarakat yang berasal dari ketiga kabupaten tersebut membentuk suatu panitia yang diberi nama **Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Kalimantan Tengah** (PPHRKT) yang berkedudukan di Banjarmasin yang dipimpin oleh C.C.Brahim dan sebagai sekretarisnya adalah J.M Nahan.

Langkah ini ternyata diikuti dengan pembentukan PPHRKT daerah di ketiga kabupaten tersebut. Selanjutnya PPHRKT ini menjadi pusat penyaluran aspirasi partai politik, organisasi masa, dan berbagai golongan yang semuanya bertujuan dan menghendaki terbentuknya suatu Propinsi Otonom yang diberi nama Propinsi Kalimantan Tengah.

Meskipun semangat dan tuntutan itu terus menggebu-gebu di dada masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, namun ternyata aspirasi itu belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah Pusat maupun oleh parlemen. Hal ini diketahui pada saat berlangsungnya pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan tiga propinsi di Kalimantan. Adapun alasan yang dikemukakan atas penolakan tersebut diantaranya adalah tentang potensi daerah (dalam hal ini potensi ekonomi). Hal ini dipandang penting oleh dengan alasan bahwa wilayah ketiga kabupaten yang diusulkan untuk dijadikan Propinsi Kalimantan Tengah itu dianggap masih belum mampu untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai daerah otonom. Sementara keadaan keuangan Pusat belum mampu untuk membantu pembentukan suatu propinsi baru, hingga akhirnya Pemerintah Pusat pun belum mengizinkan untuk membentuk propinsi baru ini. Selain masalah ekonomi yang menjadi alasan, juga di daerah ini dipandang masih

kekurangan sumber daya manusia terutama yang terampil dan terdidik untuk tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dua alasan tersebut kira-kira yang dapat diketahui dari pandangan umum para anggota parlemen, meskipun anggapan dan pandangan tersebut tidak seluruhnya benar. Akhirnya, ketika parlemen (DPR RI hasil pemilu 1955) bersidang di Jakarta yang kemudian menyetujui RUU yang dibahas untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 dan diberlakukan terhitung tanggal 1 Januari 1957, maka Kalimantan dibagi menjadi tiga propinsi, yaitu Propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Penjelasan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tersebut hanya menyatakan bahwa Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi propinsi otonom selambat-lambatnya dalam jangka waktu tiga tahun, dan sebelumnya akan dibentuk terlebih dahulu daerah karesidenan sebagai persiapan.

Perasaan kurang puas tentu dirasakan oleh rakyat Kalimantan Tengah atas disyahnkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra Propinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat tersebut. Sehingga mereka tetap menuntut bahkan mendesak Pemerintah Pusat agar pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah segera ditanggapi dan direalisasikan.

Merasa aspirasi rakyat Kalimantan tengah tersebut tidak mendapat tanggapan yang pasti, akhirnya timbullah pergolakan dan tindakan-tindakan kekerasan yang menjurus pada perlawanan fisik berupa gerakan bersenjata yang dapat menimbulkan gangguan keamanan di wilayah ini. Gerakan perlawanan yang dianggap paling kuat adalah **Gerakan Mandau Telawang Pantjasila Sakti (GMTPS)** dibawah pimpinan Christian Simbar.

Selain gerakan bersenjata yang dilakukan oleh Gerakan Mandau Telawang Pantjasila Sakti, perjuangan secara politis juga masih terus ditempuh oleh tokoh-tokoh pejuang saat itu dari berbagai golongan masyarakat dari berbagai aliran yang hidup dalam masyarakat untuk mencapai status propinsi otonom yang telah lama mereka cita-citakan. Puncaknya adalah dengan dilaksanakannya Kongres Rakyat Kalimantan Tengah yang dilangsungkan di Banjarmasin (Kalimantan Selatan) dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 Desember 1956 yang dipimpin oleh Ketua Presidium M. Mahar dan tokoh masyarakat

Kalimantan Tengah lainnya serta dihadiri oleh kurang lebih 600 orang utusan yang mewakili segenap rakyat dari seluruh Kalimantan Tengah. Adapun hasil kongres ini antara lain mengeluarkan resolusi tanggal 5 Desember 1956, yang isinya antara lain: Mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan pengertian sebelum terlaksananya Pemilihan Umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat, Kalimantan Tengah sudah dijadikan suatu Daerah Otonom.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah tersebut, kemudian membentuk lagi Dewan Rakyat Kalimantan Tengah. Dari Dewan ini mengirim utusannya menghadap Gubernur Kalimantan (pada saat itu adalah Gubernur R.T.A Milono). Selanjutnya utusan Dewan itu bersama dengan Gubernur Milono menghadap Pemerintah Pusat, menyampaikan keputusan tuntutan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah. Di sinilah antara Dewan Rakyat Kalimantan Tengah beserta Gubernur memberikan penjelasan-penjelasan guna memperoleh pengertian dan persesuaian pendapat dengan pihak Pemerintah Pusat.

Dari sinilah akhirnya Pemerintah Pusat bersama mau mendengarkan suara Dewan yang mewakili suara masyarakat Kalimantan Tengah. Hasilnya, didapatkan pengertian dan persesuaian pendapat dimana Pemerintah Pusat cq. Menteri Dalam Negeri telah mengambil satu keputusan pada tanggal 28 Desember 1956 Nomor: U.P.34/41/24, yang antara lain menetapkan:

Mulai tanggal 1 Januari 1957 membentuk "Kantor Persiapan pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah" yang berkedudukan langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri dan sementara ditempatkan di Banjarmasin, dan ditetapkan personilnya terdiri dari 21 orang.

Dan Berkantor sementara di Kantor Gubernur Kalimantan Lama dan Gubernur Milono sebagai gubernur pada Kementerian Dalam Negeri ditunjuk/ditugaskan sebagai Gubernur Pembentuk propinsi Kalimantan Tengah.

Adapun tugas-tugas yang menyangkut urusan Pemerintah Pusat langsung bertanggung Jawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Urusan Daerah Otonom bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan.

Dalam hal ini untuk membantu Koordinasi Keamanan Propinsi Kalimantan untuk memulihkan ketertiban dan keamanan Kalimantan Tengah, maka dibentuklah Panitia Pemulihan Keamanan Daerah Kalimantan Tengah terdiri dari anggota Presidium Dewan Rakyat Kalimantan Tengah sebanyak 6 orang yang diketuai oleh sdr Mahir Mahar. Tjilik Riwut (2003:33-34)

Dengan keluarnya Surat Keputusan tersebut maka secara resmi telah terbentuk Kantor Persiapan Propinsi Kalimantan Tengah mekipun kedudukannya masih di Banjarmasin dengan R.T.A Milono sebagai Gubernurnya.

3.2 Pahandut dipilih Sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah

Dalam bukunya Tjilik Riwut yang berjudul *Meneser Panatau Tatu Hiang Menyelami Kekayaan Leluhur* (2003:34) diuraikan bahwa dengan terbentuknya Kantor Pembentuk Propinsi Kalimantan Tengah yang sementara berkedudukan di Banjarmasin, bermunculanlah suara-suara, tuntutan-tuntutan pernyataan dari parpol/ormas dan dari daerah-daerah wilayah kabupaten, yang masing-masing menurut iramanya sendiri-sendiri agar ibukota Propinsi Kalimantan Tengah ditetapkan di daerahnya masing-masing.

Kabupaten Barito menghendaki lokasi ibukota Propinsi Kalimantan Tengah nantinya di Muara Teweh atau di Buntok. Dari kabupaten Kapuas, Kahayan menghendaki Kuala Kapuas atau Pulang Pisau sebagai ibukota. Daerah Katingan, Mentaya (Sampit), Seruyan, menghendaki Kota Sampit menjadi ibukota. Wakil dari daerah Pangkalan Bun (Kabupaten Kotawaringin) pun tidak ketinggalan mengusulkan agar Pangkalan Bun dijadikan ibukota. Namun dari sekian banyak usulan tersebut, tidak satupun yang menyebut nama Pahandut. Pahandut yang pada waktu itu masih berupa desa/kampung.

Dengan banyaknya usulan tadi, sehingga pembentukan propinsi ini dirasa tidak berjalan dengan lancar. Bahkan sempat terjadi kesalahpahaman antara rakyat dengan pemerintah. Berkenaan dengan itu, maka Bapak Milono, Gubernur Pembentuk Propinsi Kalimantan Tengah telah mengambil suatu kebijaksanaan membentuk satu Panitia untuk merumuskan dan mencari di mana daerah atau tempat/lokasi yang pantas dan wajar untuk dijadikan ibukota Propinsi Kalimantan Tengah.

Panitia tersebut dibentuk pada tanggal 23 Januari 1957, yang terdiri dari:

1. Mahar Mahir, Ketua Kongres Rakyat Kalimantan Tengah sebagai ketua merangkap anggota.
2. Tjilik Riwut, residen pada Kementerian Dalam Negeri dpb. Gubernur Pembentuk Propinsi Kalimantan Tengah sebagai Anggota.
3. G. Obus, Bupati Kepala Daerah dpb. Gubernur Pembentuk Propinsi Kalimantan Tengah sebagai anggota.
4. E. Kamis. Pensiunan Kiai kepala/pegawai PT Sampit Dayak di Sampit sebagai anggota.
5. C. Mihing, pegawai Jawatan Penerangan Propinsi Kalimantan di Banjarmasin sebagai anggota dan sekretaris.

Sebagai Penasehat ahli:

1. R. Moenasir, Kepala Dinas PU Persiapan Propinsi Kalimantan Tengah.
2. Ir. Van Der Pijl, pegawai PU Persiapan Propinsi Kalimantan Tengah bagian gedung-gedung.

Setelah panitia mengadakan rapat-rapat serta menghubungi tokoh-tokoh Kalimantan Tengah dan pejabat-pejabat pimpinan militer dan sipil tingkat Kalimantan di Banjarmasin, antara lain mendapat restu dari Kolonel Oetomo Panglima Tentara dan Teritorium VI/Tanjungpura, didapat kesimpulan, "bahwa di sekitar Desa Pahandut di Kampung Jekan dan sekitar Bukit Tangkiling ditetapkan untuk calon ibukota Propinsi Kalimantan Tengah"

Alasan-alasan/dasar-dasar untuk memilih Desa Pahandut menjadi calon ibukota Propinsi Kalimantan Tengah antara lain sebagai berikut:

1. Karena ada perbedaan pendapat tentang calon-calon ibukota, misalnya ada yang mengusulkan Kuala Kapuas, Pulang Pisau, Buntok, Muara Teweh, Sampit dan Pangkalan Bun, maka dipandang perlu dicari satu kebijaksanaan untuk mengatasi perbedaan pendapat ini.
2. Panitia juga berpendapat bahwa karena alasan penuntutan tersebut di atas, perlu dicari jalan keluar, yaitu mencari daerah baru yang perlu diterima oleh sebagian besar rakyat Kalimantan Tengah dan pejabat-pejabat pemerintah tingkat Kalimantan.
3. Pendapat lain dikemukakan bahwa alangkah baiknya apabila calon ibukota itu berada di tengah-tengah masyarakat seluruhnya untuk memudahkan melaksanakan proses kepemimpinan dan koordinasi

pada masa-masa yang akan datang, dan memiliki satu kota baru yang dibangun di tengah-tengah hutan rimba dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri di alam merdeka.

4. Selain alasan tersebut di atas, ada beberapa alasan yang dipandang dari sudut politik, geografis dan ekonomis.
 - Dipandang dari segi politis, demi keadilan dan menjaga agar jangan sampai terjadi keributan antar warga masyarakat Kalimantan Tengah itu sendiri.
 - Dipandang dari segi geografis, Pahandut dianggap memiliki letak yang strategis, letaknya di bagian tengah-tengah wilayah propinsi ini, sehingga apabila ibukota itu diletakkan di daerah ini akan mudah untuk menjangkau atau mengawasi daerah sekitarnya, apabila dibandingkan dengan daerah-daerah yang diusulkan menjadi ibukota sebelumnya.
 - Dipandang dari segi ekonomi, karena Pahandut letaknya di tengah wilayah Kalimantan Tengah, maka biaya pengawasan, pengendalian dan perjalanan ke daerah lainnya menjadi tidak begitu tinggi. Selain itu alam sekitar Pahandut juga berpotensi dan mengandung nilai ekonomis seperti adanya bahan bangunan pasir dan batu.
 - Dipandang dari keadaan/kondisi wilayah, pahandut dan sekitarnya memiliki lahan yang cukup luas, rata dan cukup keras, sehingga tidak sulit bagi perluasan kota, maupun pembangunan sarana dan prasarana jalan raya, dibandingkan dengan daerah yang mengalami pasang surut maupun daerah gambut. (Patianom,dkk, 199258-59).

Pemilihan Pahandut sebagai lokasi ibukota Propinsi Kalimantan Tengah ternyata bukan sekedar adanya keinginan warga masyarakat Kalimantan Tengah dengan berbagai alasan tersebut, akan tetapi dengan pertimbangan yang bersifat simbolistis. Adalah Presiden Soekarno yang dipertengahan dasawarsa 50-an memiliki gagasan untuk memindahkan ibukota negara. Bung Karno mengemukakan bahwa Jakarta bukan lagi merupakan kota yang layak berfungsi sebagai ibukota negara baik karena lokasinya yang rawan terhadap gangguan dan ancaman, baik yang bersifat eksternal maupun internal, pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat maupun kegiatan ekonomi yang semakin

padat. Bung Karno menginginkan ibukota negara itu seperti halnya Kota Washington DC atau Canberra, yang terbebas dari hal tersebut. Beliau segera tertarik pada usul-usul yang beliau terima, khususnya untuk membangun ibukota di wilayah Kalimantan Tengah.

Desa Pahandut yang berada di tepi jalur lalu lintas yang penting dan letaknya di tepi rimba raya menjadi pilihannya. Apalagi ketika diketahui bahwa letak Pahandut secara astronomis berada tepat di tengah kepulauan Nusantara (di sini pertimbangan simbolistik digunakan). Bung Karno menginginkan agar kota yang akan dibangun itu merupakan kota yang sama sekali baru, dengan perencanaan dan desain yang mengambil contoh kota-kota dunia yang pernah dikunjunginya. Al hasil, meskipun Palangka Raya tidak menjadi ibukota negara, namun sebagai ibukota propinsi, kota ini menampilkan perencanaan kota yang berbeda dengan kota-kota yang sudah ada, yang dibentuk dan dikembangkan sebagai ibukota pemerintahan daerah atau wilayah. Dan ternyata 30 tahun kemudian ide Bung Karno ini dilaksanakan oleh Dr. Mahatir di Kualalumpur yaitu di Kota Jaya (Hasil wawancara dengan Bapak Sudarto).

Gagasan pembangunan Kota Palangka Raya yang memang benar-benar kota yang baru ini, senantiasa dilanjutkan dengan tetap berdasarkan perencanaan tata-kota yang baik ke arah terwujudnya kota Palangka Raya yang modern. Dengan demikian lahirlah visi pembangunan Palangka Raya sebagai “Kota 3-M” yakni Palangka Raya sebagai Kota *Modal, Model dan Modern*.

3.3 Pahandut dan Timbulnya Nama Palangka Raya

Pada bagian di atas telah dijelaskan bahwa Panitia yang bertugas untuk merumuskan dan mencari daerah atau tempat/lokasi yang pantas dan wajar untuk dijadikan Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah, yang telah mendapat dukungan serta perhatian dari para Pejabat Teras Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dan Kalimantan serta Pemuka-Pemuka Masyarakat Kalimantan Tengah, telah menjatuhkan pilihan dan menetapkan daerah Pahandut sebagai calon ibukota Propinsi Kalimantan Tengah.

Setelah mengetahui bahwa desa Pahandut akan dicalonkan sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Tengah, maka pemuka-pemuka dan tokoh-tokoh masyarakat Pahandut menyambutnya dengan gembira

dan sangat antusias, meskipun mereka juga menyadari bahwa untuk pembangunan fisik dari sebuah ibukota propinsi itu diperlukan modal yang tidak sedikit. Oleh karena itu mereka dengan spontan menyerahkan kepada Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, hak-hak atas tanah-tanah perbatasan milik mereka, untuk dipergunakan dalam pembangunan ibukota yang telah mereka dambakan sejak dulu.

Kegembiraan dan sambutan yang sangat antusias tersebut diwujudkan serta dituangkan dalam suatu surat pernyataan yang disampaikan pada tanggal 30 Januari 1957, yang selanjutnya menjadi dasar bagi Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Adapun pernyataan dari para tetua dan pemuka masyarakat Pahandut tersebut seperti yang dikutip dari buku *Sejarah Kota Palangkaraya* (2003:24) seperti di bawah ini.

PERNYATAAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, ialah para Tetua dan Pemuka Rakyat di Pahandut (Kecamatan Kahayan Tengah) setelah mengetahui dan mendengar, bahwa pihak Pemerintah ada mempunyai hasrat untuk menjadikan Pahandut sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah, maka dengan ini kami menyatakan kegembiraan dan terima kasih yang tidak terhingga terhadap hasrat Pemerintah tersebut.

Menurut pengetahuan kami, memang Pahandut adalah satu-satunya daerah yang cocok sekali untuk dibangun menjadi Ibukota, baik dilihat dari segi pembangunan maupun dari segi perhubungan antar daerah di wilayah Kalimantan Tengah.

Oleh karena itu, kami mengharap supaya hasrat pemerintah yang hendak menjadikan Pahandut sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Tengah diteruskan hingga menjadi kenyataan.

Kami para tetua dan para Pemuka Rakyat Pahandut akan membantu sepenuhnya dan menegaskan pula di sini, bahwa tanah-tanah yang diperlukan untuk pembangunan ibukota Propinsi Kalimantan Tengah sepanjang kebutuhannya, kami bersedia untuk memberikannya dengan senang hati, dan tidak akan meminta pembayaran apa-apa, kalau seandainya ada sebagian kecil yang sudah menjadi milik Rakyat.

Pahandut, 30 Januari 1957

Tanda Tangan Kami,

1. Abd. Inin d.t.t. Abd. Inin
2. St. Rasad d.t.t. St. Rasad
3. H. Tundjan d.t.t. H. Tundjan
4. Buntit Sukah d.t.t. Buntit Sukah
5. Dinan Gani d.t.t. Dinan Gani
6. J. Rasan d.t.t. J. Rasa.
7. Tueng Kalingd.t.t. Tueng Kaling

Pernyataan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Yth. Gubernur/Pembentuk Propinsi Kalimantan Tengah
2. Yth. Acting Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Inspeksi Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan
4. Badan Pekerja Dewan Rakyat Kalimantan Tengah.

Setelah pembangunan kota yang telah dipilih sebagai calon Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah ini dimulai, ternyata tidak hanya masyarakat yang ada di Kampung Pahandut saja yang merelakan tanahnya untuk digunakan bagi pem-bangunan fisik kota ini. Masyarakat dari Kampung Jekan (kampung yang bersebelahan dengan Kampung Pahandut) juga ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan tanahnya.

Wacana bergulirnya Kampung Pahandut yang akan dijadikan calon ibukota Propinsi Kalimantan Tengah terus berlanjut. Namun demikian nama ibukota itu masih terus dicari, agar bisa sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembangunan kota tersebut. Tetapi untuk sementara dinyatakan bahwa ibukota Propinsi Kalimantan Tengah adalah Pahandut.

Untuk mencari nama ibukota propinsi yang dianggapnya cocok dan sesuai dengan maksud dan tujuan pembangunan kota ini, maka Gubernur Milono menugaskan Panitia yang sama dengan panitia yang mencari dan merumuskan calon ibukota Propinsi Kalimantan Tengah untuk mencari nama bagi ibukota Propinsi Kalimantan Tengah tersebut.

Dengan berbagai cara mereka usahakan untuk mencari nama yang tepat bagi ibukota ini, dengan tidak lupa mengumpulkan berbagai pendapat dari bermacam-macam kalangan. Pendapat atau pandangan yang dianggap penting di sini antara lain dari tetuha-tetuha dan pemuka masyarakat, termasuk tokoh-tokoh masyarakat Dayak Kalimantan Tengah seperti Damang H.S. Tundjan, Damang Saililah dan Tjilik

Riwut, termasuk juga saran dan pandangan dari Gubernur Pembentuk Propinsi Kalimantan Tengah R.T.A. Milono sendiri.

Ternyata usaha mereka ini tidak sia-sia. Setelah segala saran, pendapat dan pandangan dari beberapa tokoh masyarakat, akhirnya nama ibukota itu berhasil disepakati dan disetujui sepenuhnya oleh Gubernur R.T.A Milono dan kepastian tentang nama itu akan diumumkan sendiri oleh Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah.

Akhirnya, dalam waktu yang tidak lama, yaitu kurang lebih 4 bulan kemudian, dengan didahului upacara adat dari suku Dayak yang bertempat di Bukit Ngalangkang, Pahandut pada tanggal 18 Mei 1957 diumumkan nama ibukota Propinsi Kalimantan Tengah. Gubernur R.T.A. Milono dalam pidatonya antara lain menge-mukakan cita-cita beliau bahwa untuk memberi nama ibukota Propinsi Kalimantan Tengah harus disesuaikan dengan jiwa pembangunan dan tujuan yang suci. Nama yang dipilih untuk itu dan yang dianggap cocok adalah PALANGKA RAYA.

Kata Palangka Raya menurut kepercayaan leluhur Suku Dayak, nenek moyang Suku Dayak diturunkan dengan memakai wahana *Palangka Bulau*. Palangka berarti tempat yang suci, Bulau berarti emas atau logam mulia. Sedangkan Raya berarti besar. Dengan demikian, Palangka Raya berarti tempat yang suci dan mulia yang besar. Dalam pidatonya, Gubernur berpesan “.....sesuaikanlah nama ini dengan cita-cita dilahirkannya Kalimantan Tengah.....”. Kemudian diingatkan lagi oleh Gubernur Milono seraya mengungkapkan:”.....Kalimantan Tengah yang dilahirkan dalam suasana suci Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Paskah agar tetap memelihara kesucian dan kemuliaan.....”. Demikianlah akhirnya di Kampung Pahandut telah berdiri ibukota Kalimantan tengah dengan nama ibukotanya Palangka Raya (Tjilik Riwut, 1958:132-133).

Selanjutnya, dalam rangka peresmian ibukota dan peresmian dimulainya pembangunan Kota Palangka Raya sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Tengah, Presiden Soekarno beserta enam menteri, sejumlah pejabat Pemerintah Pusat, Anggota Parlemen, para wartawan dan dua orang Duta Besar mengadakan kunjungan ke Palangka Raya. Tepatnya pada tanggal 17 Juli 1957 Presiden dan rombongan sampai di lokasi upacara dengan disambut oleh gegap gempita ribuan masa dari Kampung Pahandut dan sekitarnya.

Gubernur Pembentuk Propinsi Kalimantan Tengah R.T.A Milono menyampaikan pidato pengantar penyambut kedatangan Presiden besera Rombongan sekaligus melaporkan secara resmi nama Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah ialah PALANGKA RAYA. Setelah itu, Demang Kepala Adat Kampung Pahandut sekaligus salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah (H.S. Tundjan) menyampaikan pernyataan kepada Presiden Soekarno. Inti dari pernyataan tersebut adalah dukungan sepenuhnya masyarakat Pahandut terhadap pembangunan Kota Palangka Raya. Adapun pernyataan tersebut berbunyi seperti yang dikutip dari buku Sejarah Kota Palangka Raya (2003:36) sebagai berikut:

Presiden Republik Indonesia Yang Kami Muliakan:

Kami atas nama Rakyat Pahandut, dengan ini menyatakan kepada P.J.M Presiden, bahwa sebagai tanda kegembiraan dan terima kasih yang sebesar-besarnya, berhubung dengan keputusan Pemerintah Pusat yang telah menunjuk Pahandut menjadi Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah, telah semufakat dengan tulus ikhlas, menyerahkan sebidang tanah yang diperlukan untuk Pembangunan Ibukota Propinsi.

Segala Hak milik atas tanah tersebut, dengan beberapa pihak yang berkepentingan telah diadakan penyelesaian dengan jalan yang sebaik-baiknya.

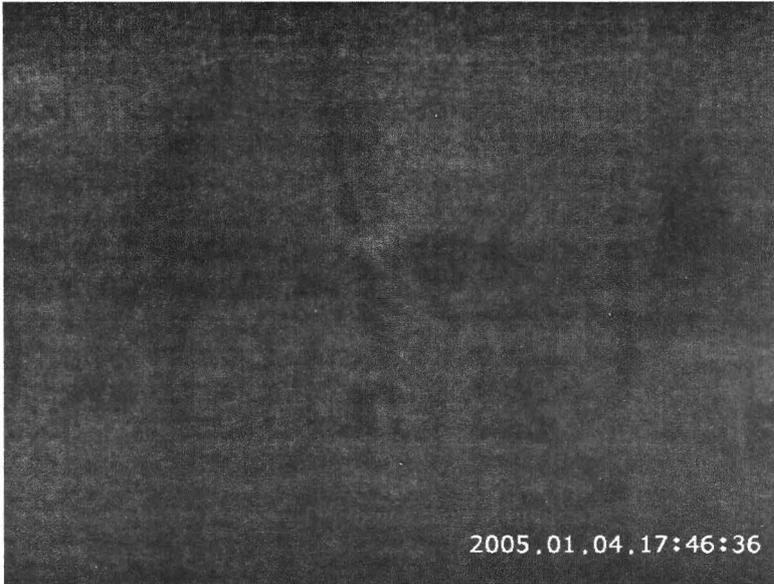
Kami menyerahkan mandau ini kepada P.J.M. Presiden, adalah sebagai tanda pembukaan dari permulaan sejarah Pembangunan Ibukota Palangka Raya, dan sebagai tanda ketulus-ikhlasan hati kami.

Pahandut, 17 Juli 1957

A.N. RAKYAT PAHANDUT.

d.t.t

H.TUNDJAN



**Hasil Repro Peletakan Batu Pertama Oleh Presiden Soekarno
pada Tanggal 17 Juli 1957 Sebagai Tanda Dimulainya
Pembangunan Kota Palangka Raya**

Kemudian Presiden Soekarno didampingi Gubernur Milono dan Residen Tjilik Riwut melakukan potong rotan (*manetek uei*) yaitu tali penahan “kepala babi” (*hamer*) dengan *mandau* pusaka Dayak menandai dipancangnya Tiang Pertama Pembangunan Kota Palangka Raya, ibukota Propinsi Kalimantan Tengah.

Pada saat peresmian pembangunan Kota Palangka Raya ini, Kota Palangka Raya masih menjadi salah satu wilayah Kabupaten Kapuas dan berstatus sebagai ibukota Kecamatan Kahayan Tengah yang dipimpin oleh Asisten Wedana yaitu J.M. Nahan.

3.4 Perkembangan Pahandut Setelah Ada Palangka Raya

Setelah dengan resmi Palangka Raya ditetapkan sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Tengah (yang pada saat itu Propinsi Kalimantan Tengah merupakan propinsi yang ke-17 dari Negara Kesatuan Republik Indonesia), mulailah daerah ini berbenah diri mulai dengan pembangunan fisik maupun pembenahan administrasi yang lain. Baru kemudian kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah

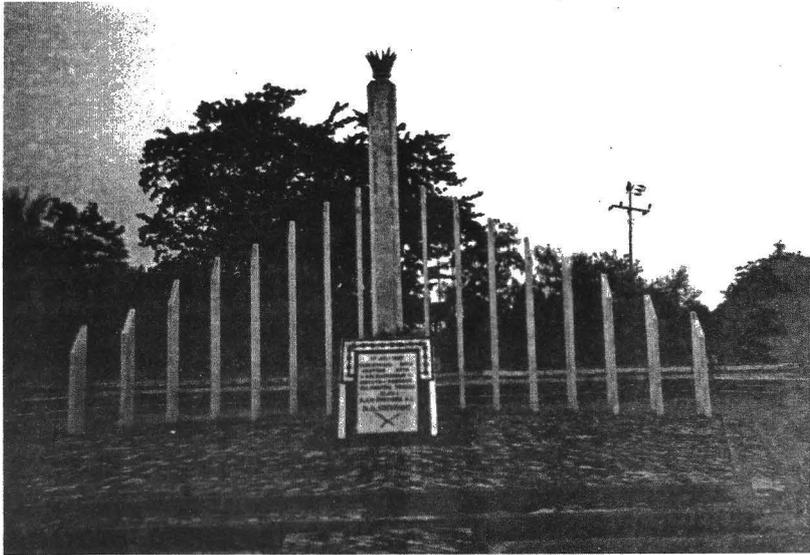


Foto 3

Tugu Peletakan Batu Pertama Yang Terletak di Jalan Ahmad Yani Palangka Raya Setelah Dipugar Tahun 1964 Hingga Nampak Seperti Sekarang Ini

berpindah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959 dan secara berangsur-angsur mulai 1 Januari 1960 seluruh dinas/jawatan/instansi dan satuan kerja serta badan-badan baik pemerintah dan swasta telah memindahkan kedudukannya di daerah sendiri yaitu Kota Palangka Raya.

Kemudian bagaimana dengan Kampung Pahandut yang semula merupakan ibukota Kecamatan Kahayan Tengah kini ditempati sebagai ibukota Propinsi?. Dengan kedudukannya sebagai ibukota Propinsi Kalimantan Tengah, maka Pemerintah Daerah segera melakukan pembenahan Kota Palangka Raya, yang dimulai dengan pemekaran wilayah administrasi, pembentukan kecamatan dan penataan kampung-kampung. Langkah pertama yang dilakukan adalah pembentukan Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Administratif Palangka Raya terhitung tanggal 1 Mei 1961 sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Tengah Nomor 3/Pem.170-C-2-3 tanggal 24 April 1961.. Hal ini

dilakukan karena salah satu syarat pembentukan suatu daerah/wilayah administrasi adalah minimal terdiri dari tiga kecamatan. Setelah hal ini terpenuhi kemudian ditingkatkan menjadi Kotapraja Administrasi Palangka Raya pada tanggal 19 Juni 1961.

Adapun Kotapraja Administratif Palangka Raya tersebut meliputi 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Palangka dengan ibukota Pahandut, Kecamatan Petuk Katimpun dengan ibukotanya di Marang Nganduruh Langit, dan Kecamatan Bukit Batu yang beribukota di Tangkiling. Pada bulan Februari tahun 1964, Kecamatan Palangka dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut yang berkedudukan di Pahandut dan Kecamatan Palangka berkedudukan di Palangka Raya. (Pemkot Palangka Raya, 2003:45-46).

Jadi apabila dilihat dari awalnya kampung Pahandut yang hanya dihuni oleh beberapa keluarga saja, akhirnya berkembang menjadi sebuah kampung yang ramai yang terdiri dari beberapa dukuh (desa kecil), seperti Dukuh Pahandut, Dukuh Petuk Ketimpun, Dukuh Hampapak, Tumbang Rungan, Jekan, Marang dan Dukuh Tahai. Kemudian setelah Zaman Kemerdekaan dimana Kalimantan tengah dengan usaha yang sangat keras akhirnya dapat berdiri sebagai Propinsi Otonom, dengan ibukota di Pahandut ini yang kemudian diberi nama Palangka Raya. Nama Pahandut bukannya terus hilang begitu saja. Setelah ada Palangka Raya di daerah Pahandut ini, Pahandut dijadikan suatu wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Pahandut. Perkembangan terakhir di era otonomi ini, Kecamatan Pahandut yang dirasakan memiliki wilayah yang cukup luas di daerah perkotaan, maka kecamatan ini dimekarkan lagi menjadi tiga kecamatan yang salah satunya juga diberi nama Kecamatan Pahandut. Bukan hanya sebatas nama kecamatan, ternyata kelurahan yang berada di bawah wilayah Kecamatan Pahandut ini pun juga ada yang diberi nama Kelurahan Pahandut dan Kelurahan Pahandut Seberang. Jadi nama Pahandut memang suatu nama yang sangat bersejarah yang selalu dipertahankan sebagai cikal bakal lahirnya kota Palangka Raya. Jadi apabila kita Ke Palangka Raya, maka akan dijumpai wilayah-wilayah dengan nama, Kampung Pahandut, Kelurahan Pahandut, Kelurahan Pahandut Seberang dan Kecamatan Pahandut.

BAB IV

STRUKTUR PEMERINTAHAN

Seperti diketahui bahwa sebelum terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamkan pada 17 Agustus 1945, di wilayah Nusantara ini telah terjadi beberapa kali pemegang kekuasaan, baik dari kekuasaan raja-raja yang membawahi daerahnya masing-masing (bagi wilayah yang berbentuk kerajaan), selanjutnya kekuasaan jatuh ke tangan penjajahan dengan sistem pemerintahan masing-masing. Perubahan terus terjadi pada masa kemerdekaan dan juga di era otonomi seperti sekarang ini. Begitu pun yang terjadi di daerah Pahandut yang pada waktu itu masih masuk daerah Dayak, khususnya wilayah Kahayan Tengah, hingga era otonomi ini memiliki sistem pemerintahan yang berubah-ubah. Perubahan sistem dan struktur pemerintahan ini akan diuraikan seperti dalam sub bab di bawah ini.

4.1 Sebelum Masa Penjajahan

Sebelum adanya/masuknya penjajahan (Penjajahan Belanda dan Jepang) di Indonesia pada umumnya dan masuk ke Kalimantan Tengah khususnya, suku Dayak telah memiliki perkampungan sendiri, yaitu tempat tinggal bersama suatu keluarga besar yang dipimpin oleh seorang **Kepala Suku**. Cara pemerintahan mereka diatur oleh suatu ketentuan-ketentuan khusus yang dinamakan dengan istilah **Hukum Adat**. Hukum adat di sini berisi peraturan-peraturan, “meskipun tidak tertulis” yang sangat dipatuhi oleh masyarakat pendukungnya (masyarakat adat yang berada di lingkungan adat Dayak tersebut). Hukum adat tersebut berisi berbagai macam peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti menyangkut masalah keamanan, peraturan-peraturan dan masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat setempat. Seperti yang diungkapkan Tjilik Riwut dalam bukunya Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan (1993:397) bahwa Hukum Adat suku Dayak itu didasarkan pada:

- a. Menjaga keamanan umum masyarakat sesuku.
- b. Memelihara kedamaian diantara rakyat sesuku bahkan manusia pada umumnya.
- c. Memelihara derajat agama dan kepercayaan.

Keputusan hukum adat Dayak senantiasa berjalan dengan tidak memaksa, tetapi diterima oleh seluruh masyarakat Dayak dengan perasaan puas, karena semua berjalan sempurna seperti apa adanya. Sebagai penanggung jawab adalah Kepala Suku, namun dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, Kepala Suku didampingi oleh ketua-ketua kampung, tanpa membedakan jenis kelamin.

Disamping tugas-tugas tersebut, Kepala Suku juga bertindak sebagai Hakim yang mengadili setiap permasalahan yang terjadi di wilayahnya/daerahnya. Hukum adat yang dijalankan berdasarkan pada *overleveringen* yang telah diakui dan ditaati oleh seluruh penduduk tanpa kecuali. Segala inisiatif sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Suku dan Ketua-Ketua Kampung, karena mereka adalah tulang punggung masyarakat.

4.2 Masa Penjajahan

Sejak kedatangan bangsa penjajah (Belanda) di bumi Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, sistem pemerintahan tradisional atau peraturan yang telah lama diterapkan oleh masyarakat pedalaman Kalimantan Tengah tersebut masih tetap dipakai. Hanya saja di sini ada perbedaan istilah, seperti nama Kepala Kampung dirubah menjadi **Pembekal**. Untuk jabatan yang lebih tinggi disebut **Damang**. Dan kemudian yang paling tinggi yaitu **Tamanggung**. Istilah-istilah tersebut menunjukkan adanya pengaruh kebudayaan Jawa. Pada uraian berikut akan diungkapkan masing-masing jabatan itu mulai dari tingkat yang tertinggi sampai jabatan tingkat yang terendah.

4.2.1 Tamanggung

Seorang Tamanggung adalah orang yang berkuasa penuh di wilayah kekuasaannya yang disebut katamanggungan.

Dalam kekuasaannya, Tamanggung di sini membawahi sejumlah kademangan dan sejumlah Pembekal (kepala Kampung). Pergantian pimpinan tidaklah menurut garis keturunan, tetapi didasarkan pada senioritas, pengalaman, keberanian dan kebijaksanaan. Tamanggung di sini bukanlah penghulu agama (basir) dan bukan pula kepala adat (demang). Dia adalah pemimpin kaumnya. Dia dipilih melalui *hapakat/* mufakat dan musyawarah tetua-tetua atau tokoh-tokoh masyarakat. Di sini sudah nampak pemisahan antara pemimpin pemerintahan,

pemimpin agama dan pemimpin adat (hukum). Mereka tergantung pada sesamanya atau berorientasi kolateral, selain patuh pada pimpinan atau berorientasi vertikal.

Seorang Tamanggung biasanya pernah menjadi damang, walaupun hal ini tidak merupakan suatu keharusan. Pada umumnya, seorang tamanggung ini memegang jabatan sampai seumur hidup. Pada tingkat kampung, sering seorang pembekal dipilih atau diganti sesuai dengan keinginan masyarakat. Adapun yang memilih tamanggung adalah para pembekal yang menjadi bawahannya. Dari gambaran tersebut, nampak bahwa masyarakat tunduk pada adat istiadat atau norma-norma yang berlaku, selain tetap patuh pada pimpinan yang telah dipilih oleh tokoh-tokoh yang mereka percayai. Nilai-nilai yang bersifat demokratis kelihatan sudah sejak lama hidup dalam masyarakat ini. Seorang tamanggung yang bijaksana, berani dan berpengalaman/berpengetahuan, akan menjadi buah bibir (basewut = termasyur) di wilayah tamanggung-tamanggung lainnya. Di daerah yang begitu luas (mungkin lebih luas daripada wilayah kecamatan sekarang) dengan penduduknya yang tersebar di mana-mana atau terpencar-pencar, tidak pernah terjadi seorang tamanggung yang membawahi tamanggung-tamanggung lainnya. Setiap wilayah memiliki satu pimpinan yaitu tamanggung yang memiliki hak otonom atas daerah kekuasaannya.

4.2.2 Demang

Jabatan demang, pada tahun 1928 dilahirkan sebagai jabatan tebusan untuk menggantikan jabatan kepala-kepala adat di masa yang lalu. Hal demikian oleh suku Dayak khususnya di Kalimantan Tengah diterima dengan baik, sebagai pemulihan dan pengakuan kembali atas adat istiadat budaya leluhur di seluruh Kalimantan. Jadi sangatlah bijaksana apabila adat istiadat leluhur dipelihara dan oleh pemerintah ditetapkan jabatan-jabatan demang kepala adat.

Demang, adalah kepala adat yang bertugas menyelesaikan perkara yang sifatnya baik perdata maupun pidana. Demang ini dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan pembantu (lid) yang berjumlah ganjil (biasanya ada tujuh orang).

Untuk dapat menduduki jabatan sebagai demang, seorang calon harus memiliki syarat-syarat tertentu, antara lain: pernah menjadi kepala kampung (pembekal), sering dibawa rapat adat, banyak pengalaman

serta memiliki pengetahuan yang luas tentang adat istiadat setempat dan adat di luar lingkungannya. Kerapatan adat yang dipimpin oleh Demang sebagai ketua memiliki anggota yang terdiri dari tetua terkemuka yang bertempat tinggal di ibukota kademangan dengan penasihat-penasihat yang disebut penghulu adat dari tiap-tiap suku yang terdapat dalam daerah kademangan.

Di daerah Pahandut, demang yang paling terkenal dalam memimpin rakyatnya adalah Damang Sawang. Pada masa periode Damang inilah, yang berkedudukan di hilir Kahayan mengalami perkembangan penduduk yang sangat pesat.

Pada masa kemerdekaan, kemudian terbentuk Propinsi Kalimantan Tengah, jabatan demang tetap ada dan dilembagakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16-PRD-1969, tanggal 16 September, yaitu tentang pemilihan, pengangkatan, pemecatan sementara, pemberhentian dan penetapan sementara wilayah serta tugas dan kewajiban seorang demang kepala adat dalam daerah Propinsi Kalimantan Tengah. Pada era otonomi sekarang ini, dari Peraturan Daerah itu, jabatan demang dinaikkan menjadi Surat Keputusan Gubernur. Adapun tugas demang sekarang ini adalah membantu tugas camat mengelola di bidang adat. Tetapi tidak menutup kemungkinan bergerak juga di bidang pembangunan. Meskipun tidak setiap hari harus pergi berkantor/dinas seperti layaknya pegawai negeri, seorang demang diberikan tempat tersendiri dalam dinasnyanya, yaitu di Kantor Kecamatan. Tugas seorang demang justru lebih banyak diselesaikan di rumahnya. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih banyak mengadukan masalahnya bukan lagi ke kantor, namun langsung ke kediamannya. Dalam berkehidupan di masyarakat, seorang Demang justru lebih dicari dan dimintai pendapat tentang segala sesuatu yang menyangkut permasalahan kehidupan bermasyarakat daripada ke aparat pemerintah. Itulah sebabnya seorang Demang lebih dikenal di masyarakat daripada seorang Lurah/ Kepala Desa, Camat atau jajarannya. Masyarakat akan menghadap ke aparat pemerintah seperti itu hanya apabila ada urusan tentang administrasi seperti mengurus/ mencari KTP.

Namun meskipun jabatan demang ini sudah diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah (Perda), kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur, namun menurut salah satu demang yang berhasil

ditemui mengatakan bahwa penghasilan dari jabatan demang ini sangat tidak memadai di masa sekarang ini.

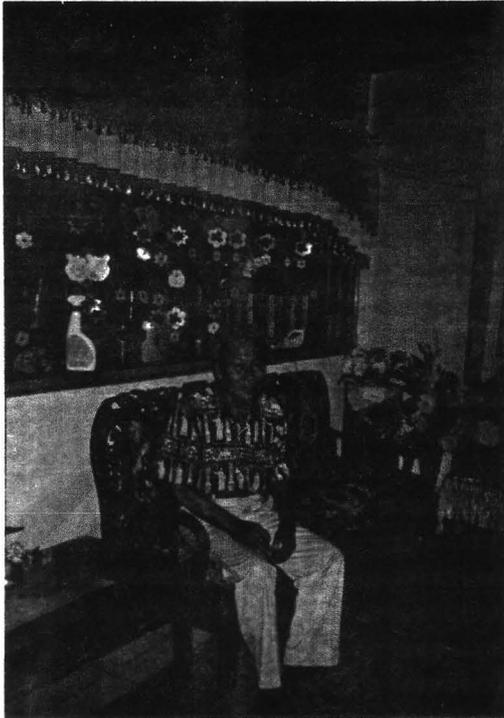


Foto 4

Bapak Semal Penyang, Seorang Demang Yang Masih Menjabat di Kecamatan Pahandut

4.2.3 Pembekal

Seperti telah dikemukakan di atas bahwa jabatan yang paling bawah dalam organisasi pemerintahan tradisional masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah khususnya dinamakan kepala kampung yang lebih dikenal dengan istilah pembekal. Jabatan pembekal merupakan jabatan yang terhormat tanpa efek finansial yang berarti dan memadai, kerana untuk seorang pembekal tidak disediakan semacam gaji atau *tanah bengkok* (seperti halnya kepala desa di Jawa). Pembekal tidak memperoleh penghasilan-penghasilan yang dapat menunjang hidupnya

dari jabatan itu, kecuali sekedar uang kehormatan, uang tiga tali yang dibayarkan oleh tiap-tiap wajib pajak, dan mereka ini termasuk orang yang bebas pajak.

Oleh karena itu, seorang pembekal tidak saja harus seorang tokoh yang disegani, cerdas dan mempunyai pengaruh luas dalam masyarakat, namun juga yang memiliki kedudukan ekonomi yang cukup kuat. Berbeda dengan di Jawa, dimana jabatan seperti lurah/kepala desa itu menjadi rebutan, baik oleh perorangan maupun oleh golongan atau partai, jabatan pembekal sungguhpun tinggi dan terhormat di mata masyarakat, namun sangatlah sukar untuk mendorong seseorang agar mau mencalonkan diri dalam pemilihan pembekal baru. Kerap kali terjadi seorang pembekal memangku jabatan itu seumur hidupnya, sungguhpun yang bersangkutan sendiri mungkin telah beberapa kali meminta untuk mengundurkan diri.

Seorang pembekal dalam pekerjaannya sehari-hari dibantu oleh seorang Pangirak merangkap juru tulis dan beberapa staf pamong desa lainnya. Tugas utama seorang juru tulis ialah melaksanakan administrasi kampung dan sebagai pangirak, dia bertugas menyampaikan secara lisan segala pengumuman kepada penduduk kampung, seperti pengumuman tentang kerja bakti kampung, tentang rapat kampung untuk pemilihan pembekal baru, dan sebagainya.

Pada masa yang lalu, seorang pembekal biasanya didampingi oleh kepala adat untuk soal-soal yang berhubungan dengan adat. Seorang kepala adat biasanya dibantu oleh dewan adat yang terdiri dari pangulu dan mantir.

Pembekal Ngabe Soekah, adalah salah satu pembekal di daerah Pahandut yang sangat terkenal. Hal ini seperti yang diceritakan di bawah ini.

Ikhwal pasangan suami isteri Bayuh dan Kambang (seperti telah diceritakan dalam bab asal mula nama dan kampung Pahandut di depan), mereka memiliki dua orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Jaga, sedang adiknya bernama Soekah. Bayuh sampai hari tuanya tetap dipercaya sebagai Kepala Kampung pahandut, dan di usia senjanya, Bayuh mengharapkan salah satu dari kedua puteranya itu untuk menggantikannya sebagai kepala kampung.

Jaga sebagai anak tertua dengan terpaksa menerima permohonan ayahnya untuk menggantikan kedudukan ayahnya sebagai kepala

kampung. Sementara itu adiknya (Soekah) pergi dari kampungnya merantau sampai ke Puruk Cahu. Ketika itu Tamanggung Wangkang sedang mengangkat senjata melawan penjajahan Belanda yang dikenal dengan Perang Wangkang sekitar tahun 1870. Si Soekah pun membantu dan maju ke medan peperangan bertempur melawan serdadu Belanda.

Setelah selesai perang wangkang di Puruk Cahu, Soekah kembali ke kampungnya dan berkumpul kembali bersama keluarganya di Pahandut. Mengetahui sepak terjangnya dalam pengembaraannya, di Kampung Pahandut kemudian Soekah dipilih menjadi kepala kampung memimpin masyarakat Pahandut menggantikan kakaknya.

Dalam menjabat sebagai Kepala Kampung Pahandut, ternyata membawa perubahan yang sangat signifikan. Kampung Pahandut semakin maju dan bertambah ramai, dan banyak dikunjungi pendatang dari luar daerahnya. Seluruh warga masyarakatnya menikmati kehidupan yang makmur dan sejahtera, aman, nyaman dan damai. Atas jasa-jasanya memimpin dan membina kampung Pahandut dan membawa ke arah kemajuan inilah, maka Pemerintah Belanda memberi gelar Ngabe Anum kepada Soekah. Akhirnya nama Ngabe Anum Soekah lah yang lebih ternama sebagai kepala Kampung Pahandut atau kemudian dikenal dengan Pembekal Kampung Pahandut. Namun sebutan yang lebih terkenal dalam masyarakat adalah sebutan akrab tetapi mengandung rasa hormat, yaitu Ngabe Soekah saja.

Ngabe Soekah sebagai Pembekal (Kepala Kampung) yang satu ini namanya sangat dikenal di mana-mana. Dia sangat disegani, dihormati oleh rakyatnya. Sehingga dia dikenal sebagai Pembekal pertama yang dapat memberikan kesejahteraan penduduk sekaligus berperang melawan penjajahan Belanda. Atas keberhasilan dan jasa-jasanya inilah, maka sewaktu wafatnya dibuatkan *Sandung* khusus. Sandung Ngabe Soekah sekarang ini dapat dilihat di pertigaan Jalan Darmosugondo dan Jalan Murjani Palangka Raya (depan terminal sementara), dan lebih terkenal dengan nama Sandung Ngabe Soekah Pahandut.

Jadi dapat digarisbawahi bahwa sistem pemerintahan yang terdapat pada suku Dayak di Kalimantan Tengah pada zaman dahulu yang mereka kenal hanyalah kelompok kepala kampung (pembekal), kepala suku tamanggung dan damang (pemimpin di bidang hukum dan adat). Biasanya wilayah kekuasaan itu terbuka dalam arti suatu

kampung atau kelompok dapat saja menempatkan diri di bawah pengaruh seorang tamanggung, damang dan pembekal. Ada persyaratan pengalaman, prestasi dalam masyarakat dan senioritas (ketuaan dalam usia maupun pengalaman). Mereka dipilih bukanlah melalui sistem pewarisan turun temurun. Pemilihan biasanya dimulai dari *hapakat* (mufakat/musyawarah) pada tingkat kelompok-kelompok yang lebih kecil. Pendapat dari para tetua kampung atau bekas-bekas lewu selalu merupakan pendapat yang menentukan. Nilai perwakilan dan permusyawaratan nampak jelas dalam sistem kemasyarakatan mereka (Depdikbud, 1079:59-60).

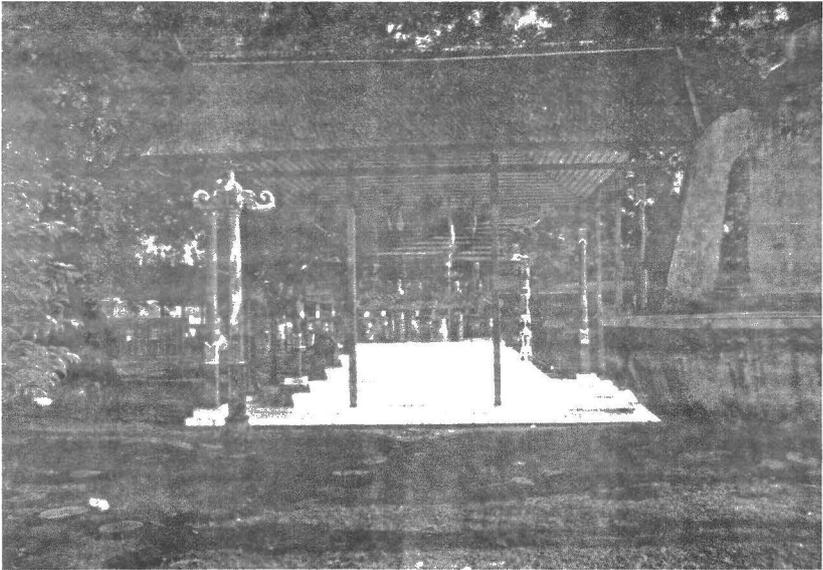


Foto 5

Sandung Ngabe Soekah Pahandut Yang Terletak di Jalan Darmo Sugondo Palangka Raya

4.3 Setelah Kemerdekaan

Setelah bangsa Indonesia secara resmi merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sistem pemerintahan yang dibentuk oleh penjajah Belanda maupun oleh Jepang secara otomatis akan berubah. Pada tahun 1946, *Afdeling* Kapuas – Barito beserta seluruh *onderafdeling* nya

dihapus. Bekas wilayah *onderafdeling Beneden Dajak* dipecah menjadi dua *distrik*, yaitu : *Distrik Kapuas* dan *Distrik Kahayan*. *Distrik Kahayan* itu sendiri dibagi menjadi dua *onderdistrik*, yaitu *Onderdistrik Kahayan Hilir* dengan ibukotanya di Pulang Pisau, dan *Onderdistrik Kahayan Tengah* dengan ibukotanya di Pahandut. Adapun sebagai Kepala *Onderdistrik Kahayan Tengah* yang pertama adalah G.T. Binti.

Setelah pemulihan kedaulatan dan Propinsi Kalimantan Tengah menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka sebutan *distrik* diganti menjadi *Kawedanan*. Sedangkan sebutan *Onderdistrik* dirubah namanya menjadi Kecamatan. *Onderdistrik Kahayan Tengah* berganti menjadi Kecamatan Kahayan Tengah dengan ibukotanya di Pahandut.

Namun setelah Pahandut ditetapkan sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah, pada tahun 1960 ibukota Kecamatan Kahayan Tengah dipindahkan ke Bukit Rawi. Sedangkan Pahandut sendiri yang kemudian berubah menjadi Palangka Raya dipersiapkan untuk pembentukan Kecamatan Khusus Palangka Persiapan Kotapraja Administratif Palangka Raya, yang kemudian ditingkatkan menjadi Kotapraja Palangka Raya pada tanggal 19 Juni 1961.

Setelah Kotapraja Palangka Raya terbentuk pada tanggal 19 Juni 1961 tersebut, pada awalnya hanya terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Palangka dengan ibukota Pahandut, Kecamatan Petuk Katimpun dengan ibukotanya di Marang Nganduruh Langit, dan Kecamatan Bukit Batu yang beribukota di Tangkiling. Pada bulan Februari tahun 1964, Kecamatan Palangka dimekarkan menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut yang berkedudukan di Pahandut dan Kecamatan Palangka berkedudukan di Palangka Raya. (Pemkot Palangka Raya, 2003:45-46). Adapun yang menduduki jabatan camat untuk pertama kalinya di Kecamatan Pahandut adalah J.M. Nahan, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Wedana di kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Kapuas.

4.4 Era Otonomi Daerah

Jauh sebelum ini dipilih sebagai Ibukota Kalimantan Tengah, Pahandut hanyalah sebuah kampung kecil yang terletak di tepi sungai Kahayan. Seperti halnya kampung-kampung Dayak yang lain, kampung ini pun dikepalai oleh seorang Pembekal (kepala kampung). Setelah

masa kemerdekaan, terjadilah perubahan/ pergantian sistem pemerintahan hingga di era otonomi daerah seperti sekarang ini.

Di era otonomi seperti sekarang ini dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang disebut Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah, dimana Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan azas desentralisasi.

Undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional serta diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Disamping itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dengan adanya Undang-undang ini, Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai daerah otonom juga ikut berbenah diri. Termasuk di Kecamatan Pahandut yang berkedudukan di Pahandut tersebut dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat, maka pada tahun 2002 dimekarkan lagi menjadi tiga kecamatan, yang salah satunya juga Kecamatan Pahandut. Dengan demikian Kota Palangka Raya yang pada awalnya hanya terdiri dari tiga kecamatan, di era Otonomi ini dimekarkan menjadi lima kecamatan. Kecamatan Pahandut sebagai salah satu dari lima kecamatan yang berada di wilayah Kota Palangka Raya, memiliki luas wilayah 117,25 Km². Seperti pada awalnya, Kecamatan Pahandut ini dilintasi oleh Sungai Kahayan yang menjadi sungai kebanggaan masyarakat di Propinsi Kalimantan Tengah umumnya.

Adapun secara administratif, wilayah Kecamatan Pahandut ini berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Kahayan Tengah
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Sebangau
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Sebangau
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Jekan Raya



Foto 6
Kantor Kecamatan Pahandut Yang Kini Terletak
di Jalan Diponegoro Palangka Raya

Kecamatan Pahandut yang sebagian besar berada di wilayah perkotaan ini terdiri dari enam kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Pahandut
- b. Kelurahan Panarung
- c. Kelurahan langkai
- d. Kelurahan Tumbang Rungan
- e. Kelurahan Pahandut Seberang dan
- f. Kelurahan Tanjung Pinang

Pemerintahan di Kecamatan Pahandut sebagai pelaksana pemerintah umum yang membawahi 6 (enam) kelurahan, dalam melaksanakan tugasnya camat mempunyai kedudukan sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Walikota, dalam hal ini Walikota Palangka Raya. Seorang Camat memiliki tugas menetapkan pelaksanaan serta penyelenggaraan segala urusan pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat di kecamatan. Karena beratnya tugas dan tanggung jawab seorang camat itulah, dalam

melaksanakan tugasnya, seorang camat dibantu oleh seorang Sekretaris Camat dan beberapa staf, yang tergabung dalam kelompok jabatan fungsional seperti PPLKB, PPL Pertanian, Koordinator Statistik, juga beberapa seksi seperti Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan, Seksi Kesejahteraan Sosial (Kesos) dan Seksi Ketertiban dan Pelayanan Umum.

BAB V

PENUTUP

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa Pahandut merupakan cikal bakal atau asal mula lahirnya Kota Palangka Raya. Boleh juga dikatakan bahwa Pahandut itu sebagai kota asal Palangka Raya. Pahandut ini pula sekarang merupakan basis untuk melangkahkakan kaki pertama apabila ingin datang di Palangka Raya. Baik itu datangnya melalui sungai maupun melalui udara, karena kedua sarana transportasi ini terletak di Pahandut. Pelabuhan Rambang di kampung Pahandut dan Bandara Tjilik Riwut yang meskipun terletak relatif jauh dari Kota Palangka Raya, namun masih masuk dalam Kecamatan Pahandut. Di kedua tempat inilah merupakan pintu pertama masuk ke Kota Palangka Raya.

Pahandut yang merupakan wilayah yang dapat dikatakan tua di Kota Palangka Raya ini, sebagian besar wilayahnya termasuk dalam wilayah perkotaan. Pahandut yang dulunya hanyalah sebuah kampung kecil dan sepi, kini menjelma menjadi sebuah wilayah perkotaan yang ramai dan padat penduduknya. Lahan-lahan yang dulunya merupakan lahan pertanian, kini berubah menjadi pasar dan berbagai pertokoan. Hotel, penginapan, café, restoran dan masih banyak lagi fasilitas perkotaan yang menghiasi sudut-sudut kota. Kesan masyarakat Dayak dengan segala keunikan dan kesederhanaan sudah tidak nampak lagi di sini. Dengan kondisi yang demikian ini, maka penduduk Pahandut yang dulunya bermatapencaharian bertani, kini sebagian besar matapencahariannya banyak bergerak di bidang perdagangan.

Dipilihnya Pahandut sebagai Ibukota dari Propinsi Kalimantan tengah memang bukan tanpa alasan. Meskipun di beberapa kota seperti Kota Puruk Cahu. Muara Teweh dan Buntok di Kabupaten Barito, Sampit atau Pangkalan Bun di Kabupaten Kotawaringin, atau Kabupaten Kapuas telah mengusulkan sebagai lokasi ibukota propinsi Kalimantan Tengah, namun dengan berbagai pertimbangan rasional dan mempertimbangkan analisa dampak lingkungan, maka Pahandut adalah pilihan yang tepat dilihat dari beberapa sudut pandang seperti dari segi politis, segi geografis/strategis, dan dari segi ekonomis. Setelah Pahandut ditetapkan sebagai lokasi Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah, secara perlahan dicari lagi nama yang tepat untuk

mengganti nama ibukota tersebut yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan dibentuknya propinsi itu. Maka ditemukanlah nama Palangka Raya menggantikan nama Pahandut. Meskipun nama Pahandut sampai sekarang tetap ada sebagai nama kecamatan dan nama kelurahan di Kota Palangka Raya ini. Dengan demikian nama Palangka Raya baru timbul setelah terbentuk Propinsi Kalimantan Tengah.

Apabila Kota Palangka Raya dapat dikatakan sebagai kota yang masih relatif muda, dibandingkan dengan kota-kota lain di Kalimantan Tengah khususnya dan kota-kota di Indonesia pada umumnya, maka wajar apabila kota ini senantiasa berbenah diri dalam segala hal, dari berbenah dalam bidang pembangunan fisik maupun dalam bidang pelayanan pada masyarakatnya. Itu pula sebabnya pembangunan Kota Palangka Raya dilaksanakan dengan visi “Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Pusat Pelayanan Publik, pemukiman yang nyaman dan tertata, pemerintahan yang bersih, pembangunan sumber daya manusia, dunia usaha dan pariwisata tanpa menghilangkan budaya daerah”.

Untuk mewujudkan tercapainya visi seperti tersebut di atas, maka diperlukan misi Pemerintah Kota Palangka Raya, yaitu:

- a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik.
- b. Meningkatkan kualitas pembangunan pemukiman dan perkotaan serta pengelolaan pertanahan dan penataan ruang.
- c. Menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.
- d. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
- e. Meningkatkan kemampuan dan pengembangan kegiatan dunia usaha dalam arti luas.
- f. Mengembangkan pariwisata sebagai pintu gerbang masuknya wisatawan ke Kalimantan Tengah yang kesemuanya dilandasi dengan motto “CANTIK” yaitu Terencana, Aman, Nyaman, Tertib, Indah, Keterbukaan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan strategi dan kebijaksanaan sebagai berikut:

- a. Mobilisasi sumber daya lokal yang mencakup pengembangan sumber daya lahan, lingkungan dan wilayah.
- b. Meningkatkan keterpaduan dalam pengembangan infrastruktur.
- c. Meningkatkan peran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- e. Menggali dan meningkatkan PAD dan sumber pembiayaan pembangunan lainnya.
- f. Pengembangan budaya dan perilaku masyarakat.
- g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pendayagunaan aparatur pemerintah. (Monografi Kecamatan Pahandut Tahun 2004)

Dengan visi, misi dan strategi Kota Palangka Raya seperti tersebut di atas, maka Pahandut (dalam hal ini Kecamatan Pahandut) yang merupakan bagian dari Pemerintahan Kota Palangka Raya tentu saja selalu seia sekata mendukung dan melaksanakan misi, misi dan strategi yang sama demi keberhasilan wilayah ini secara keseluruhan.

Dari seluruh uraian di atas, dapat penulis rekomendasikan di sini, baik kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Palangka Raya maupun kepada Pemda Propinsi dan Kota Palangka Raya agar tulisan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan:

- a. Penulisan Sejarah Lokal Palangka Raya
- b. Penelusuran Hari Jadi suatu daerah
- c. Pelajaran Muatan lokal dalam dunia pendidikan

DAFTAR PUSTAKA

Ahim, S. Rusan, Kumpiady Widen, dkk

2004 *Sejarah Kalimantan Tengah*. Palangka Raya: Proyek Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah/ Wilayah di Kalimantan Tengah

Anonim

1979 *Monografi Daerah Kalimantan Tengah*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Proyek Media Kebudayaan.

2003 *Adat Istiadat Dayak Ngaju*. Palangkaraya: Lembaga Swadaya Masyarakat. Pusat Budaya Betang Kalimantan Tengah (LSMPBBKT)

2004 *Selayang Pandang Kota Palangka Raya Tahun 2004*. Pemerintah Kota Palangkaraya.

2005 *Monografi Kecamatan Pahandut Tahun 2004*. Kantor Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.

Kuntowijoyo

2003 *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Laman, Tjoembie

2001 *Sejarah Singkat Perjuangan Rakyat Dalam Pembentukan Propinsi Kalimantan Tengah* Palangka Raya : Makalah

Nila Tjilik Riwut

2003 *Maneser Panatau Tatu Hiang. Menyelami Kekayaan Leluhur*. Palangka Raya: Pusakalima.

Notosusanto, Nugroho

1970 *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta: Idayu

Usop, KMA.

1994 *Pakat Dayak: Sejarah Integrasi dan Jati Diri Masyarakat Dayak dan Daerah Kalimantan Tengah*. Palangka Raya: yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Katang Garing

Patianom, dkk

1992 *Sejarah Sosial Palangka Raya*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.

Pemkot Palangka Raya

2003 *Sambutan Sekaligus Catatan Pembuka (Opening Remark) Walikota Palangka Raya*. Disampaikan Dalam Seminar "Menelusuri Hari Jadi Kota Palangka Raya, Tanggal 2 Juni 2004.

Tim Penulis Buku Sejarah Kota Palangka Raya

2003 *Sejarah Kota Palangka Raya*. Pemerintah Kota Palangka Raya.

Tjilik Riwut

1958 *Kalimantan Memanggil*. Jakarta : Endang.

1993 *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaanannya*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana

Arsip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Tengah

Dokumen Pribadi Koleksi Bapak T.T Suan

Dokumen Pribadi Koleksi Bapak Tijel Djelau

LAMPIRAN

DAFTAR INFORMAN

1. N a m a : Semal Penyang
U m u r : 79 Tahun
Pendidikan : -
Agama : Hindu (Kaharingan)
Jabatan/Pekerjaan : Demang/Tokoh Masyarakat
Alamat : Desa Pahandut, Kec. Pahandut Palangkaraya
2. N a m a : T.T Suan
U m u r : 74 Tahun
Pendidikan : Sarjana
Agama : Kristen
Jabatan/Pekerjaan : Pensiunan PNS Pada Pemda Palangka Raya
Alamat : Palangkaraya
3. N a m a : Tijel Djelau
U m u r : 79 Tahun
Pendidikan :
Agama : Kristen
Jabatan/Pekerjaan : Ketua LVRI Prop. Kalteng/Tokoh Masyarakat
Alamat : Kasongan, Kabupaten Katingan Hilir
4. N a m a : Christiana Nahan
U m u r : 55 Tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Kristen
Jabatan/Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah TK)
Alamat : Jl. Murjani, Pahandut Palangkaraya
5. N a m a : Drs. Petrus Awan. M. Si
U m u r : 49 Tahun
Pendidikan : Pasca Sarjana
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Palangka Raya

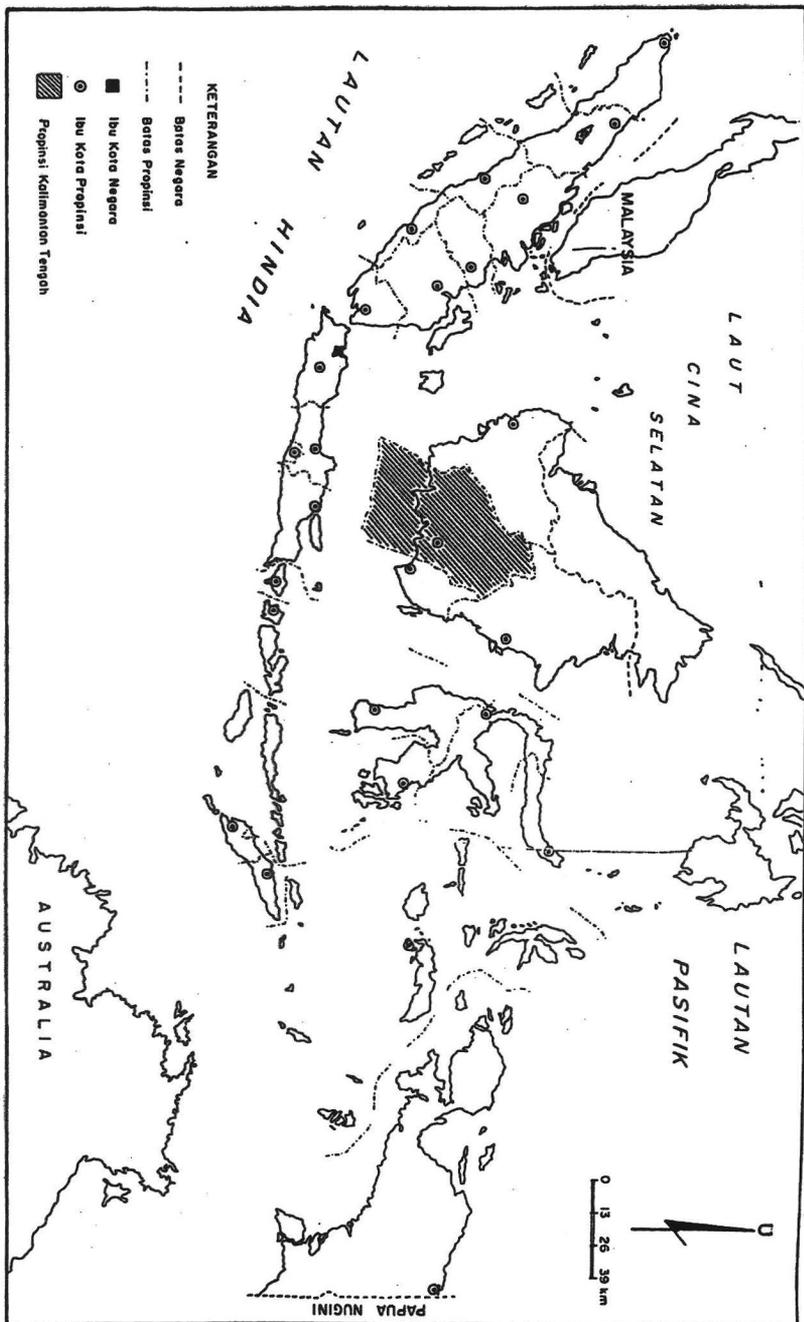
6. **N a m a** : Carlo Toni
U m u r : 45 Tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Palangka Raya
7. **N a m a** : Dra. Nunun
U m u r : 46 Tahun
Pendidikan : Sarjana
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Palangka Raya
8. **N a m a** : Drs. Haryanto
U m u r : 45 Tahun
Pendidikan : Sarjana
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Palangka Raya
9. **N a m a** : Drs. H. Sudarto
U m u r : 67 Tahun
Pendidikan : Sarjana
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan
Alamat : Pontianak
10. **N a m a** : Prof. Dr. A.B Lopian
U m u r : 61 Tahun
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Manado

DAFTAR PERTANYAAN

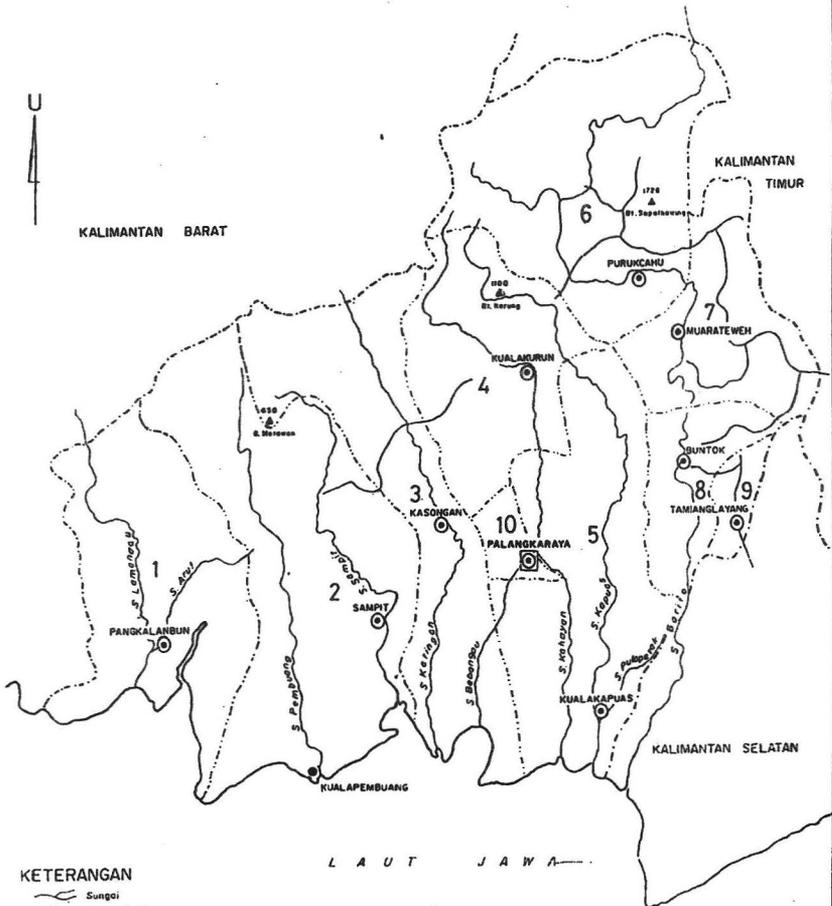
1. *Bagaimana cerita asal-usul Kampung Pahandut berikut penduduknya?*
2. *Tolong ceritakan juga asal-usul kampung itu dinamakan Kampung Pahandut?*
3. *Sejak kapan kampung itu ada?*
4. *Dari mana saja penduduk kampung Pahandut itu berasal, dari asal Bukit Rawi atau dari daerah lain?*
5. *Bagaimana kondisi pemukiman kampung Pahandut itu dilihat dari segi ekonomi maupun geografisnya?*
6. *Menurut ceritanya, kampung Pahandut itu semakin ramai, apa yang menyebabkan bertambah ramainya kampung itu?*
7. *Setiap pemukiman khan selalu ada pemimpin atau kepalanya. Lalu siapa yang menjadi kepala kampung Pahandut ini? Dan apa istilah kepala kampung di sini?*
8. *Kalau kampung yang dikepalai oleh seorang kepala kampung atau pembekal merupakan pemerintahan tingkat paling rendah dalam struktur pemerintahan di sini, lalu apa nama pemerintahan yang lebih tinggi dari itu?*
9. *Tolong ceritakan hak dan kewajiban serta tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan dalam pemerintahan tradisional?*
10. *Apakah struktur pemerintahan tradisional itu dapat bertahan setelah kedatangan penjajahan Belanda?*
11. *Apabila ada perubahan, apa saja yang berubah dan berubah menjadi apa?*
12. *Kemudian tolong ceritakan struktur pemerintahan itu setelah Indonesia merdeka sampai pada era otonomi seperti sekarang ini*
13. *Apakah sampai saat sekarang ini masih ada atau masih berfungsi pejabat-pejabat seperti itu, sementara sekarang sudah ada lurah, camat, bupati walikota dan sebagainya?*
14. *Apakah sampai saat sekarang ini masih ada atau masih berfungsi pejabat-pejabat seperti itu, sementara sekarang sudah ada lurah, camat, bupati walikota dan sebagainya?*
15. *Bagaimana kedudukan Demang ini diantara struktur organisasi di kecamatan?*

16. *Apakah demang memiliki kantor tersendiri atau berkantor di kantor camat, dan bagaimana cara atau sistem pengganjiannya, apakah dia dimasukkan pegawai negeri atau bukan?*
17. *Katanya Kampung Pahandut ini merupakan awal berdirinya Kota Palangka Raya ini. Apakah Bapak bisa menceritakan?*
18. *Perjuangan seperti apa yang dilakukan oleh masyarakat "Kalimantan Tengah" dalam memperjuangkan terbentuknya suatu daerah otonom sendiri?*
19. *Organisasi-organisasi apa sajakah yang terbentuk sebelum daerah otonom Propinsi Kalimantan Tengah itu terbentuk?*
20. *Bagaimana kiprah atau perjuangan organisasi itu, bergerak di daerah saja atau berlanjut ke Pemerintah Pusat?*
21. *Bagaimana kondisi daerah Kalimantan Tengah dalam usaha memperjuangkan terbentuknya propinsi itu?*
22. *Kapan usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi politik di daerah itu atau tokoh masyarakat itu berhasil?*
23. *Setelah berhasil memperjuangkan Kalimantan Tengah menjadi suatu Propinsi, lalu dimana ibukotanya?*
24. *Siapa yang menentukan atau menunjuk Kampung Pahandut untuk diusulkan menjadi lokasi ibukota propinsi?*
25. *Alasan apa saja Panitia menunjuk daerah Pahandut sebagai lokasi ibukota?*
26. *Apakah daerah-daerah lain tidak iri terhadap Pahandut karena dipilih jadi lokasi ibukota Propinsi padahal itu hanya kampung kecil*
27. *Kapan ibukota propinsi itu pindah dari Banjarmasin ke Palangka Raya?*
28. *Kapan kota Palangka Raya itu resmi terbentuk?*
29. *Bagaimana proses terbentuknya Palangka Raya itu menjadi sebuah ibukota Propinsi?*
30. *Bagaimana ceritanya Pahandut itu kemudian berubah menjadi Palangka Raya?*
31. *Apakah nama Palangka Raya memiliki arti khusus sehingga dipilih menjadi nama ibukota propinsi?*
32. *Apabila Kampung Pahandut itu cikal bakalnya Palangka Raya, lalu bagaimana dengan nasib Pahandut sendiri?*

PETA I. INDONESIA



PETA 2. PROPINSI KALIMANTAN TENGAH



KETERANGAN

- Sungai
- Gunung/bukit
- Batas provinsi
- Batas kabupaten/kotya
- Ibu kota provinsi
- Ibu kota kabupaten
- Ibu kota kecamatan
- Tempat lain
- Jalan

0 20 40km

Kabupaten

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1 Kotawaringin Barat | 6 Murung Raya |
| 2 Kotawaringin Timur | 7 Barito Utara |
| 3 Katingan | 8 Barito Selatan |
| 4 Gunung Mas | 9 Barito Timur |
| 5 Kapuas | 10 Kota madya Palangkaraya |





**Perpustakaan
Jendera**

9